



**LAPORAN 70%
HASIL PENELITIAN
KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI**
Strategi Penerapan Kurikulum Responsif Gender Pada PTKIN Di Indonesia

OLEH

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP/NIDN. 197209222000032001/2022097302

Dr. Miti Yarmunidia, M.Ag

NIP/NIDN. 197705052007102002/2005057702

Dr. Mariah Kibtiyah, S.Ag. M. Si

NIP/NIDN 197301221998032001/2022017301

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia sudah menyelenggarakan workshop mengenai kurikulum berbasis gender dan bahkan sudah melakukan pelatihan bagi dosen dalam rangka menyusun kurikulum berbasis gender dan pembelajaran berbasis gender dan mengintegrasikan kajian gender dalam mata kuliah lainnya. Perguruan tinggi keagamaan Islam yang telah melakukan workshop dan pelatihan terkait kurikulum dan pengintegrasian kajian gender dalam mata kuliah diantaranya adalah UIN Antasari Banjarmasin, UIN Mataram, UIN Sunan Kali Jaga, IAIN Salah Tiga dan lain yang tentunya dilakukan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI. Keinginan untuk melakukan penguatan kurikulum berbasis gender dan kajian gender dalam mata kuliah dilatarbelakangi juga oleh peran gender yang bersifat fleksibilitas sehingga menjadi kunci kebahagiaan dan adanya kritik terhadap kurikulum dan sistem pembelajaran konvensional yang arah sudut pandanganya hanya dari kacamata kaum laki-laki saja padahal seharusnya dari kedua sudut pandang yakni laki-laki dan perempuan agar dapat lebih menguatkan nilai kesetaraan itu sendiri.

Kebijakan pengintegrasian kajian gender dan kurikulum berbasis gender di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk dukungan perguruan tinggi akan terciptanya kampus ramah perempuan. Sebagaimana dinyatakan oleh Elliot seperti dikutip oleh Susilaningsih¹ bahwa kurikulum menggambarkan cerminan atas sikap dan perilaku semua yang ada di kelas, lembaga pendidikan, golongan masyarakat, dan negara mengenai isu-isu tertentu. dari kurikulum itulah tujuan pendidikan tergambar dengan jelas karena tujuan itu ditetapkan berdasarkan kemauan dan kebijakan pembuat kurikulum.² Setiap orang dimanapun dia berada menginginkan terwujudnya keadilan dan kebijaksanaan bagi semuanya orang tanpa hendak berbuat diskriminasi dan ataupun subordinasi pada salah satu jenis kelamin. Namun pemahaman pihak pelaksana kurikulum yang berkeadilan gender pada pendidikan masih jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.³

¹ 'Susilaningsih, dkk. Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dengan McGill ISEP, 2004.

² 'Yanuari Dwi Puspitarini and Yuli Utanto, "Ideologi Gender Dalam Konstruksi Kurikulum Program Studi Di Universitas Negeri Semarang," *Teknodika* 17, no. 1 (2019).

³ 'Abdul Syukur Ibrahim, "Pemahaman Sekolah Terhadap Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kurikulum Setara Jender," *Kajian Linguistik dan Sastra* 1, no. 1 (2016).

Sudah jelas bahwa kurikulum yang disahkan di perguruan tinggi merupakan turunan dan realisasi serta aktualisasi dari visi dan misi instansi perguruan tinggi dan program studi yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut. Kurikulum merupakan gambaran dan terjemahan kongrit dari visi dan misi yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Pendidikan adalah salah satu implementasi dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi, dalam melaksanakan tugasnya itu berbagai ragam cara, ada perbedaan antara individu yang satu dengan lain. Begitupun juga dalam pendidikan dalam menyusun, menerapkan kurikulum responsif gender sebagaimana yang kehendaki oleh komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, mengingat visi, misi sistem dan tujuan pendidikan di setiap lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam.

Dalam kurikulum dijelaskan banyak komponen seperti; capaian pembelajaran tujuan pembelajaran, materi, dan topik perkuliahan, referensi yang digunakan, strategi pembelajaran, media pembelajaran, prasarana yang digunakan dan evaluasi pembelajaran. Perguruan Tinggi keagamaan Islam yang peduli atau respon akan kesetaraan gender pasti melakukan langkah-langkah menuju kampus yang ramah perempuan dengan salah satunya mengintegrasikan kesetaraan gender kedalam visi, misi, tujuan dan komponen yang terkait termasuk dalam kurikulumnya dan atau ke satuan acuan pembelajarannya pada mata kuliah. Terimplementasikan gender dalam kurikulum dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi adalah salah satu bukti bahwa lembaga pendidikan responsif gender. Penguasa sudah mencanangkan program kesetaraan gender yang tertuang dalam Instruksi Kepala Negara No 9 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa tiap institusi pemerintah harus memasukkan aspek kesetaraan serta kesamarataan laki-laki dan perempuan dalam tiap pemograman, penerapan, monitoring, penilaian program atau kebijaksanaan, serta kegiatannya. Perihal ini dengan jelas dituangkan juga dalam GBHN 1999- 2004, UU No 25 Tahun 2000 mengenai Propenas serta Perjanjian Forum Pendidikan Dunia di Dakkar pada bulan April 2000 mengenai pendidikan buat seluruh, yang salah satu komponennya merupakan kesetaraan laki-laki dan perempuan, tercantum di dalamnya cara merumuskan kurikulum yang berplatform pada kesetaraan laki-laki dan perempuan.. Hal ini merupakan makna kurikulum yang amat luas serta sangat kerap dipakai dalam pembelajaran.⁴

Menurut kementerian PPPA perguruan tinggi bisa di katagorikan ke dalam perguruan yang responsif gender jika di perguruan tinggi tersebut mempunyai, PSGA,

⁴ ‘Membangun Kurikulum Berbasis Gender: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, (<http://www.sunanampel.ac.id/berita/detail.php?id=98>).

profil gender, Peraturan Rektor dan SOP tentang pencegahan, penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual, unit layanan terpadu, Standar mutu pendidikan (kurikulum/SAP berbasis gender), pengabdian masyarakat, tata kelola yang responsive gender. Seluruh civitas akademiknya turut serta berperan merencanakan-mengevaluasi kegiatan Tri darma Perguruan Tinggi yang responsive gender dan pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki berstatus zero.⁵ Fakta dilapangan perempuan khususnya yang status mahasiswi masih sering mengalami perlakuan diskriminasi bahkan sampai terjadi kekerasan dan pelecehan baik secara verbal maupun non verbal di lingkungan kampus dan ataupun di luar kampus. Dikarenakan perlakuan diskriminasi baik kekerasan dan pelecehan di lingkungan kampus mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak baik para akademisi maupun pemerhati perempuan. Untuk itu akademisi harus berpartisipasi mencegah berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kampus dengan memulai dari tata kelola maupun kurikulum. Pengintegrasian gender di perguruan tinggi ini diperlukan selain buat menghilangkan pembedaan kepada perempuan juga buat menjamin hak-hak wanita yang mempunyai kesetaraan dengan laki-laki dalam bidang pendidikan. Pemerintahpun turun tangan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk pengintegrasian gender di perguruan tinggi khususnya di PTKIN dengan melakukan kegiatan workshop ataupun pelatihan, mendata, mendukung dan memantau kegiatan perguruan tinggi responsif gender melalui PSGA yang ada di lingkungan PTKIN.

Kajian kontekstual kekinian menjadi landasan yang kuat dalam merespon isu gender dewasa ini, bahwa Islam tidak mendiskreditkan perempuan, bahwa secara riil perempuan sekarang mampu berperan di berbagai aspek kehidupan dengan kelebihan yang dia miliki.⁶ Penyebaran pemahaman tentang adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan diperulakan tindakan yang kongrit dari perguruan tinggi yakni dengan mengajarkan teori-teori tentang perempuan dalam proses pembelajaran baik dengan menentukan kurikulum khusus atau memasukkan materi kesetaraan gender pada beberapa matakuliah dan bahkan menggunakan kedua langkah tersebut, yakni membuat kurikulum khusus yang membahas tentang perempuan dan juga menyelipkan materi materi khusus

⁵ <https://www.umsu.ac.id/2020/02/23/umsu-satu-satunya-pt-responsif-gender/di> kunjungi 23 Desember 2021

⁶ 'Faquhuddin Abdul Kodir, 60 *Hadis Shahih; Khusus tentang hak-hak perempuan dalam Islam dilengkapi penafsirannya*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019); Ahmad Asrof Fitri dkk, *Menyelami telaga kebahagiaan bersama 20 Ulama perempuan: Interpretasi Berbasis Pengalaman atas Kitab Manba' As-Sa'adah*, (Jawa Barat: Mubadalah.id, 2021).; Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di atas panggung sejarah*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2020).;Husein Muhammad, *Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2020); Faquhuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, (Bandung: Afkaruna, 2021); Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta:IRCiSoD, 2020).

keperempuanan berbagai matakuliah. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang responsif gender menjadi suatu keniscayaan, sebab banyak masyarakat yang memandang dan beranggapan kebijakan pendidikan di Indonesia baik pada kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama masih bias gender mulai dari tata kelolah, kurikulum, bahan ajar dan ataupun dari segi lainnya, padahal keberpihakan pada gender dapat menjadikan manusia berkarakter ((*human character building*). Mengonsept kurikulum butuh memikirkan tiga- lingkungan yang dibantu oleh usaha campur tangan serta adaptasi, mulai dari kategori, sekolah, serta area keluarga. Supaya pembangunan kurikulum tidak bias kelamin, butuh mempertimbangkan perspektif gender dalam meningkatkan kurikulum pembelajaran kepribadian di seluruh tingkatan.²

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penelusuran secara mendalam dan ilmiah tentang penerapan kurikulum yang responsif gender di beberapa perguruan tinggi Islam sebagai salah satu cara menuju kampus ramah perempuan. Mengingat pembahasan tentang kurikulum yang berwawasan gender sudah sering digaungkan sejak beberapa tahun yang lalu, sedangkan pembangunan pemberdayaan perempuan dimulai terlaksana secara terencana sejak tahun 1978. Namun realisasinya pada perguruan tinggi Islam bagaimana serta seperti apa belum terasa.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini peneliti jabarkan sebagai berikut

1. Bagaimana struktur kurikulum responsif gender di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia?
2. Bagaimana strategi penerapan kurikulum responsif gender pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia?
3. Bagaimana efektifitas penerapan kurikulum responsif gender Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang dibangun oleh peneliti dengan mengangkat rumusan masalah tentang kurikulum responsif gender dalam rangka menuju kampus ramah perempuan dan anak adalah :

1. Menganalisa struktur kurikulum responsif gender di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia
2. Menguraikan Strategi Penerapan Kurikulum responsif gender Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia Menuju Kampus Ramah Perempuan

3. Menganalisa efektifitas penerapan kurikulum responsif gender Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia.

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup dua aspek:

1. Aspek akademis, dapat bermanfaat bagi pengembangan kampus dalam menerapkan kurikulum yang responsif gender menuju kampus yang ramah perempuan dan anak, meminimalisir dan bahkan menghapus terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual dan anak Serta dapat menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan dan menyusun kurikulum responsif gender.
2. Aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan inspirasi kepada semua orang terutama para perempuan dan anak bahwa perempuan serta anak mempunyai hak yang sama dalam semua hal

D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Penelitian berbasis gender di perguruan tinggi untuk sekarang ini sedang sangat digalakan dan dianjurkan oleh pemerintah dalam rangka menyongsong kampus ramah perempuan sehingga memberikan keadilan bagi perempuan, dan anak serta perlindungan atas perilaku *bullying*, pelecehan dan kekerasan yang sering terjadi di kampus. Oleh karena itu penelitian tentang kurikulum berbasis gender di perguruan tinggi keagamaan Islam sangat signifikan untuk diteliti karena dapat mengungkap bagaimana bentuk strategi penerapan kurikulum responsif gender yang berdampak pada kampus yang ramah perempuan, peduli akan perempuan dan yang memberikan keadilan serta perlindungan pada perempuan.

Oleh karena itu menurut pendapat peneliti bahwa penelitian kurikulum responsif gender sangat layak dan penting untuk diteliti dan dibiayai karena menyangkut masa depan perempuan, masa depan generasi bangsa.

E. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini berupa draft artikel untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi (scopus) dan dummy buku serta HAKI

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terkait dengan kurikulum ramah perempuan sudah ada beberapa diantaranya:

1. Kurikulum pendidikan dasar dalam persepektif gender oleh Muhammad Muttagien⁷ dalam penelitian dinyatakan bahwa ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dan

⁷ Jurnal : Edukasi Jurnal penelitian pendidikan Islam, vol 9, No 1 Februari 2014, DOI: 10.21043/edukasi.v9i1.767

juga formulasi yang ditawarkan yakni melalui komponen isi/struktur kurikulum, dan strategi pengajaran, Sehingga kurikulum harus mengarah pada pengembangan perilaku dan sikap responsif gender dengan harapan untuk memperkecil perilaku bias gender. Untuk itu semua struktur baik tenaga pendidikan dan kependidikan harus menyiapkan diri baik dari segi pemahaman dan strukturnya. Dalam pembelajaran perempuan diberikan kesempatan yang pertama dalam merespon, memberikan pendapat ataupun yang lainnya. Tenaga pengajar harus menyelipkan muatan gender dalam proses pembelajaran, berdialog ataupun dalam menganalisa permasalahan dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran harus bersifat dua arah.

2. Kurikulum berbasis gender”membangun pendidikan yang berkesetaraan gender, oleh Iswah Andriana⁸ dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang mengakibatkan kesenjangan gender adalah pertama, faktor akses, dimana ditemukan adanya ketimpangan gender dalam proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran. Kedua, faktor kontrol, dominannya peran laki-laki. Faktor ketiga adalah faktor partisipasi, perempuan kurang berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendidik secara formal dan yang terakhir adalah faktor benefit yang mana laki-laki sangat dominan dalam menentukan kebijakan pendidikan, suara perempuan kurang dan bahkan tidak didengar dalam menentukan kebijakan.
3. Kurikulum pendidikan keluarga responsif gender” oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan direktur jenderal pendidikan anak usia dini.⁹. Kurikulum berbasis gender yang diberlakukan di sekolah Taman kanak –kanak tahun 2014 semua ini dalam rangka mewujudkan mandat Inpres Nomor. 9 Tahun 2000, Inpres No 84 tahun 2008 mengenai Prinsip Penerapan PUG, Pembelajaran diberlakukan sebagai bentuk kepedulian pada kapasitas PUG. Dalam merealisasikan mandat Inpres itu Departemen Pembelajaran serta Kultur sesuai dengan Renstra Kemdikbud tahun 2012 yang mana ketercapainya 54% di Kabupaten atau Kota.

Pembelajaran responsif gender oleh Marlina Gazali Dosen Bidang Tarbiyah STAIN Baginda Qaimuddin Kendari¹⁰. Pembelajaran responsif kelamin merupakan perlakuan dan pemberian peluang baik laki-laki maupun perempuan memperoleh

⁸ E. Journal iain Madura.ac. id/index.php/tadris/article/view/249/240. 2009 di kunjungi tgl 22, 12 tahun 2021

⁹ ‘Kurikulum pendidikan keluarga responsif gender.http://katalog.kemdikbud.go.id > ..Pendidikan Keluarga; Classification: 371.78; Series Title: GMD: Text; Language: Indonesia; Publisher: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan .

¹⁰ <https://ejournal.iainkendari.ac.id > article> [PEMBELAJARAN RESPONSIF GENDER DALAM ...](https://docplayer.info > 208264764-Pembelajaran-respo...)
<https://docplayer.info > 208264764-Pembelajaran-respo...>

Pembelajaran, Selaku ciptaan Allah swt perempuan dan laki-laki memiliki peran sama dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Tidak boleh adanya bias dalam pengembangan ruang public, domestik apalagi dalam pendidikan formal maupun non formal.

Bentuk penataran responsif gender di STIT Pematang, oleh Amirul Bakhri, Sri Faryati, Badar Rozak. Dalam kegiatan ini yang dicermati adalah tentang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dan mahasiswi perlu adanya balance baik akses, kesempatan, kesertaan, pengawasan dan kegunaan. Dan dinyatakan bahwa responsif kelamin di semester 1 A: 92, 59%, di semester 1 B: 93, 3%, di semester 3 A: 90, 47%, di semester 3 B: 100%, di semester 5 A: 79, 41% serta di semester 5 B: 96, 15%. Kemudian Suryanef¹¹ Jurnal Ilmiah Kajian Gender UNP Padang Sumbar, bahwa kebijaksanaan pembelajaran responsif gender, ekspansi akses perempuan pendidikan menengah di Sumatera Barat. Pembelajaran merupakan hak asasi. Pembelajaran yang tidak eksklusif, dan profitabel sangat baik bagi perempuan maupun laki-laki, kesetaraan (equity) terbentuk dengan adanya kedekatan pada masyarakat, akses luas bagi laki-laki dan perempuan jika adanya sinergitas yang punya sekolah, dan warga. Kebijakan responsive gender diharapkan bersinambung. Untuk itu tiap masyarakat harus bersama-sama mensupport pembelajaran yang responsif gender, dan respon terhadap pendidikan ramah gender.

Artikel KH. Husen Muhammad “ Prinsip Islam yang Berkeadilan Gender sebagai Landasan Penulisan buku mata kuliah persepektif Gender, strategi Penyusunan Buku Mata Kuliah Perspektif gender oleh Iklilah Muazayyanah Dini Fajri yang disampaikan pada saat penguatan penulisan buku mata kuliah reponsif gender di IAIN Metro Lampung. Di dalam tulisan tersebut dinyatakan bahwa mata kuliah yang responsif gender akan menciptakan kehidupan yang bernafaskan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender., Lalu Lenny N Rosalin dari PPPA bidang kesetaraan gender menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul Pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan melalui kebijakan perguruan tinggi responsif gender bahwa untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun berada maka perlu adanya mata kuliah responsif gender.

¹¹ <https://www.researchgate.net/publication/269584076> KEBIJAKAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER Article · May 2013 DOI: 10.15548/jk.v3i2.60

G. Kerangka Teoritis

Undang-undang 1945 dan Pancasila Intruksi presiden Nomer 9 tahun 2000, dinyatakan setiap institusi pemerintah wajib memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam tiap institusi penguasa harus memasukkan aspek kesetaraan serta kesamarataan laki-laki dan perempuan dalam tiap pemograman, penerapan, monitoring, penilaian program atau kebijaksanaan, serta kegiatannya. Perihal ini dengan cara jelas pula dituangkan dalam GBHN 1999- 2004, UU No 25 Tahun 200 mengenai Propenas serta Perjanjian Forum Pendidikan Dunia di Dakkar pada bulan April 2000 mengenai pembelajaran buat seluruh, yang salah satu komponennya merupakan kesetaraan laki-laki dan perempuan, inklud di dalamnya metode merumuskan kurikulum yang berplatform pada kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Pemahaman dalil yang terambil dari Dalam al-Qur'an dan ataupun Hadis Nabi Muhammad saw Rasulullah bahwa kurikulum Bernilaiikan gender – itu nampak penunjukannya yakni adanya kesamaan dan kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Seperti disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 187 berikut ini:

.... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Mereka perempuan merupakan busana bagimu aduhai pria, serta kamupun(pria) merupakan busana untuk mereka(wanita)”. Busana dimaknai sebagai seorang, dengan busana terkini seseorang memperoleh karakter terkini. Lebih jauh, busana berperan bisa menaruh ataupun menyembunyikan badan, membatasi pemikiran hendak bagian- bagian yang bertabiat individu serta mencegah penggunaanya. Jadi pemahaman atas ikatan suami–istri itu aksudnya berdialog satu serupa lain pada alterego keduanya serta tiap orang harus mencegah pendampingnya. Perihal ini membuktikan kesetaraan dalam ikatan, terdapatnya kesalingan dan kebersamaan yang tercantum dalam prinsip pernikahan.¹²

Pada sistem pembelajaran tidak berpihak pada wanita alhasil cuma pria yang memperoleh peluang untuk mengenyam pendidikan hingga dikala seperti itu wanita akan tertinggal dan tertindas, seakan hanya laki-laki saja yang mempunyai kecerdasan walaupun tidak ada bukti dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa manusia yang berjenis

¹² ‘Ratna Megawangi, “Sekapur Sirih”, dalam The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam, Terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), hal. 16.

kelamin laki-laki dilahirkan memang sudah cerdas.¹³ Dengan demikian jelas sekali bahwa kecerdasan itu didapat dari sistem pendidikan bukan karena jenis kelamin. Al-Quran dan Hadis Nabi menjelaskan bahwa perempuan mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki dalam menuntut ilmu dan berpendidikan.¹⁴ Inilah konsekuensinya yang harus diambil dalam rangka mengimplementasikan nilai kemanusiaan yang sejati dengan memberikan kesetaraan dan atau berlaku tidak bias gender. Seorang perempuan sama dengan seorang laki-laki yang harus mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan setinggi tingginya. Banyak statment yang melaporkan kalau pria serta wanita memiliki pertemuan dalam pembelajaran, antara lain dikemukakan oleh Athiyah begitu juga diambil oleh Roqib kalau jeritan Islam hendak terdapatnya kebebasan, pertemuan, serta peluang yang serupa antara sang banyak serta sang miskin dalam seluruh aspek tercantum dalam aspek pembelajaran tidak hanya itu penghapusan sistem kategori, mengharuskan bagi muslimin dan muslimat dalam menuntut ilmu, bagaimanapun caranya, dengan tidak mengabaikan bakat dan minat yang bersangkutan.¹⁵

Pendidikan yang baik yang diterima oleh anak dapat mengantarkan orangtuanya selamat dari siksaan neraka, sebagaimana Hadis nabi Muhammad, yang bermakna begini “Sekolah dan pendidikan pertama bagi anak-anak adalah Ibunya, maka jika seorang ibu mempersiapkan pendidikan bagi anak-anaknya dengan baik, berarti ibu telah menyiapkan keturunannya dan sebagai generasi bangsa yang mempunyai kepribadian, karakter dan moralitas yang unggul. “Jadi sangat jelas bahwa ajaran Islam tidak membolehkan adanya bias gender terhadap pendidikan bagi anak-anak dan atau generasi penerus. Semua generasi dan anak mempunyai hak yang sama dan seimbang sehingga mereka dapat menjalani dan menghadapi persoalan hidup di dunia dan akhirat dengan baik¹⁶Sikap cuek dan tak peduli terhadap pendidikan perempuan seperti kurikulum yang ada di perguruan tinggi tidak mengakomodir materi atau kurikulum yang berbasis gender itu sama saja dengan membiarkan perempuan terjebak dalam kegelapan karena bodoh, tidak bias mengembangkan potensi yang perempuan miliki dan perbuatan yang demikian ini adalah bentuk kezaliman yang nyata. Kezhaliman tersebut akan merugikan

¹³ ‘Bustamin, “Menggali Isu Gender dalam Kurikulum Hadis dan Ulumul Hadis”, dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, Departemen Agama, UIN Syarif Hidayatullah, CIDA dan McGill, 2005), hal. 80.

¹⁴ Dipahami dari Al-qur’an Surat al-Mujadalah ayat 11.

¹⁵ ‘Roqib, Pendidikan Perempuan (Yogyakarta: Gama Media dengan STAIN Purwokerto, 2003), hal. 48-9.

¹⁶ ‘Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra’yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 33.

generasi bangsa dan potensi negara untuk maju dan melanggar aturan al-Qur'an dan Hadis Nabi .

Dari sini bisa dimengerti kalau pembelajaran untuk wanita amat berarti dalam menjalankan peran dan fungsinya di dalam keluarga dan masyarakat, di dalam warga terlebih dalam rumah tangga. Peranan yang di emban seseorang wanita tak mungkin bisa terselenggara dengan bagus tanpa pembelajaran serta pengajaran yang bagus. Dengan tugas dan kewajiban yang begitu kompleks yang diemban perempuan serta perkembangan dunia yang juga semakin pesat, maka pendidikan bagi perempuan mutlak harus ada dan diberikan. Perlu diingat bahwa jika perempuan tidak mendapatkan pendidikan dengan baik maka perempuan tidak akan mampu menjalankan perannya, baik sebagai individu dalam keluarga maupun sosial yakni dalam masyarakat,. Pendidikan perempuan, akan sangat banyak dampaknya yakni satu keluarga karena peran ibu. Kenyataan di masyarakat bahwa mayoritas anggota keluarga sukses itu karena mendapatkan pendidikan dari ibunya, karena ibunya sukses mendidiknya. Jadi pendidikan perempuan sebagai calon ibu yang akan memberikan pendidikan bagi generasi penerus harus diberikan dengan baik juga.

Apabila tingkat pendidikan dan pengalaman perempuan semakin baik akan semakin baik juga harkat dan martabat keluarga dan keturunannya. Dan akan semakin baik moralitas, harkat dan martabat bangsa,. Kecerdasan anggota masyarakat akan memakmurkan Negara dan bangsa dimana masyarakat itu berdominasi.

Strategi dan struktur kurikulum yang memuat materi-materi keadilan laki-laki dan perempuan, dibagi dalam 4 tingkat ialah.

1. Contributions approach; Kurikulum Berplatform gender dicoba dengan sistem serta kebijaksanaan lembaga pendidikan. Isu- isu gender dimasukkan dengan cara yang akurat ke dalam kurikulum yang ada. Bentuk ini diberlakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah kurikulum berperspektif gender terlihat serta timbul dalam bermacam mata kuliah dengan cara akurat. Capaian ini dari terdapatnya kebijaksanaan arahan dalam bagan membuat kesetaraan kelamin. Sedangkan di Universitas Indonesia di program studi kajian Perempuan terdapat mata kuliahnya terdiri dari 40- 46 sks, seluruh memakai perspektif gender.¹⁷
2. *Additive Approach*: Tata cara alterasi serta perspektif lain ditambahkan pada kurikulum tanpa mengubah bentuk kurikulum yang terdapat dengan cara biasa. Pandangan serta gagasan hal gender dimasukkan serta berhubungan ke kurikulum yang ada, ini terjadi pada lembaga pendidikan yang belum terdapat kebijaksanaan

¹⁷ 'Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2 Agustus 2008, (<http://www.pps.ui.ac.id/ui/kwkurikulum.htm>)

kurikulum berperspektif gender dengan cara jelas dan amat terkait pada sensibilitas dosen mengenai gender.

3. *Transformational Approach*; Kurikulum dijadikan responsif gender dari berbagai aspeknya. Struktur mata kuliah juga mengakomodir isu gender. Misalnya dalam mata kuliah fiqh munakahat stressing pembahasan pada pendapat ulama tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, kemudian dibahas dengan perspektif gender.¹⁸
4. *Social Action Approach*: pendekatan ini dilakukan dengan mendiskusikan materi-materi tentang keadilan gender dari berbagai aspek, kemudian melihat fenomena di masyarakat tentang praktek keadilan gender, diskriminasi terhadap perempuan, mengapa itu terjadi, dan apa sikap yang harus diambil dalam menyikapi kenyataan ketidakadilan gender di masyarakat.¹⁹

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah deskriptif analisis, yang bentuk penelitian kualitatif, peneliti mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah desain multikasus.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.²⁰ Penelitian yang bercorak studi lapangan (*Field Research*) dengan memadukan dua pendekatan yakni kuantitatif, peneliti menjelaskan menggunakan angka-angka berapa perguruan tinggi keagamaan islam yang responsif gender, berapa yang menerapkan kurikulum berbasis gender serta metode penerapan yang mana yang efektif, yang berdampak terhadap kampus sehingga menjadi kampus ramah perempuan, selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis yaitu dengan cara peneliti mengamati, menganalisa dokumen, dan mewawancarai subyek penelitian di lapangan secara langsung agar mendapatkan data dan informasi dari sumber pertama. dan Sehingga penggalan data tentang peristiwa dapat dilakukan secara detail dan mendalam terkait dengan upaya dan strategi penerapan kurikulum responsif gender.

¹⁸ 'Syahrul A'dam, "Isu-isu Gender dalam Mata Kuliah Tasawuf", dalam Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender, hal. 94.

¹⁹ 'Membangun Kurikulum Berbasis Gender: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 02/08/2008, (<http://www.sunanampel.ac.id/berita/detail.php?id=98>).

²⁰ 'Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karya, 2001) h.4

2. Sumber Data

Penelitian ini, membutuhkan berbagai sumber data, yaitu data sumber data primer sumber data sekunder dan sumber data tertier. Sumber Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang terkait dengan penjelasan dan keterangan langsung dari tangan pertama. Seperti dari beberapa perguruan Tinggi yang telah menerapkan kurikulum responsif gender, pejabatnya, dosen yang mengajar, mahasiswa, pedoman penyusunan kurikulum, kurikulum dan SAPnya.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu adalah Dokumen Visi, Misi, Tujuan, Renstra, SK Rektor terkait Pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di kampus, dan lain sebagainya. Dan data tertiernya diambilkan dari wawancara pada pemerintahan melalui kementerian agama pusat dan komnas perempuan pusat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui beberapa, yakni:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pejabat, Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di berbagai kampus yang masuk dalam kriteria kampus atau perguruan tinggi keagamaan Islam yang responsif gender diantaranya mempunyai Pusat Studi Gender (PSG) atau Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Adapun Perguruan tinggi keagamaan Islam yang menjadi sample untuk dikunjungi adalah Universitas Islam Negeri Mataram. Universitas Islam Negeri Mataram selain mewakili Indonesia bagian timur 2, juga merupakan baru beralih status dari IAIN menjadi UIN sehingga aturan dan kebijakan setiap lini diperbaharui termasuk kurikulum, lalu Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh karena ketua PSGAnyanya sangat senior dan aktif melaksanakan kegiatan responsive gender lalu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta karena selain menurut informasi merupakan Universitas Islam Negeri yang telah menerapkan kurikulum responsive gender, yang lokasinya di pusat ibu kota Indonesia. Dan data melalui wawancara dan pengamatan juga diambil di kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dan ada kurang lebih 23 Kampus Universitas Islam Negeri atau dan Institut Agama Islam Negeri yang pengambilan datanya melalui links google

form yang peneliti kirim ke Kepala Pusat Studi Gender dan juga Dosen untuk di isi dan disebar luaskan ke perwakilan Dosen serta mahasiswa di kampusnya masing-masing. Peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh penggiat perempuan seperti MUI, Patayat, Muslimat, Aisya, Alimat, dan lain sebagainya. tokoh penggiat perempuan perlu diwawancara dalam rangka mendapatkan banyak informasi tentang hal-hal terkait matakuliah, materi responsive gender yang akan diterapkan di berbagai program studi.

Peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan untuk menggali informasi dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dibuat. Berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan. Peneliti mewawancarai informan secara langsung dan terbuka dengan pertanyaan berkembang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menggali informasi secara mendalam, sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan jelas sebagaimana pedoman yang dikemukakan oleh Iskandar.²¹ Peneliti mencatat hasil wawancara secara langsung sebagai dokumen agar mudah merekap datanya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Burhanudin²².

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian dengan mengamati instrument-instrument yang relevan dengan fokus penelitian ini. Termasuk didalamnya RPS/SAP, kurikulum, pedoman akademik dan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan kurikulum. Peneliti mendatangi lokasi di mana objek penelitian berada, kemudian peneliti melakukan pengamatan terhadap dokumen-dokumen tersebut sebagaimana dalam pedoman penelitian²³

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang peneliti lakukan dalam rangka untuk mendapatkan lebih banyak lagi data yang diperlukan,. Sebab menurut Bungin²⁴ tata cara dokumenter merupakan satu tata cara pengumpulan informasi dalam riset. Suprayogo serta Tabrani berkata kalau studi dokumentasi merupakan pelacakan data melalui catatan ataupun barang yang berhubungan dengan

²¹ "Iskandar," *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta:GP Press, 2008), hlm. 253

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 102-103.

²³ 'Bungin, ' *Metode Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 134

²⁴ "Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 144

masalah penelitian baik berupa insiden ataupun aktivitas khusus. Bisa berupa rekaman atau arsip informasi base, surat-surat, rekaman lukisan, dan barang-barang aset yang berhubungan dengan sesuatu insiden.

Menggali, mendalami dan merekapitulasi semua hal terkait tentang kurikulum, respons gender, keadilan bagi perempuan dan ramah terhadap perempuan serta kebijakan-kebijakan Rektor dan pejabat kampus terkait, pemerintah, ataupun, RPS, Jurnal Perkuliahan, SOP dan buku-buku. Pengumpulan data dilakukan secara simultan, tidak bersifat hirarkis dan saling bertautan antara satu teknik dengan teknik lain, seperti wawancara sambil observasi. Bahkan salah satu dari teknik di atas kadang dijadikan bahan *cross-check* data dan atau *triangulasi* untuk menjamin keterpercayaan data.

Jika diperlukan pendalaman data yang diperoleh dari angket terbuka maka akan dilakukan melalui observasi dan wawancara atau sebaliknya, seperti ketiga teknik pengumpulan data awal.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) dalam hal ini terkait teori-teori dari buku-buku atau artikel terkait pentingnya kurikulum berbasis gender. Peneliti akan melakukan penelaahan terhadap dokumen, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Sumber data sekunder dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk pemahaman tentang masalah penelitian.²⁵ Peneliti menggunakan data sekunder dengan mengambil foto-foto atau dokumentasi hasil wawancara peneliti dengan para informan.

4. Teknis Analisa Data

Saat data penelitian sempurna atau mendekati sempurna, peneliti akan melaksanakan analisa data baik yang berupa pernyataan, gejala, tindakan verbal dan non verbal yang telah direkam baik berbentuk deskripsi kalimat atau oleh gambar. Prosedur analisis datanya mengacu pada analisis data penelitian fenomenologi. Sebagaimana dikatakan oleh Creswell sebagaimana dikutip oleh Kuswarno²⁶ adalah:

- a. Peneliti pertama-tama mendefinisikan secara global pengalaman peneliti.

²⁵ "Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. (kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta:GP Press, 2008), hlm. 77.

²⁶ Kuswarno, Engkus, *'Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 72

- b. Kemudian Peneliti menciptakan statement (dalam tanya jawab) mengenai bagaimana beberapa orang menguasai poin, rinci pernyataan- pernyataan itu serta perlakukan tiap statment mempunyai deskripsi yang sebanding, agar dapat meningkatkan rician agar tidak melaksanakan klise dan kebertumpukan.
- c. Pernyataan-pernyataan tersebut dikelompokkan kedalam unit- unit berarti (meaning Bagian), peneliti merinci unit- unit itu serta menorehkan suatu uraian bacaan (textural deskripsiton) mengenai pengalamannya, tercantum contoh-contohnya dengan cara saksama.
- d. Peneliti setelah itu merefleksikan pemikiran serta memakai alterasi angan-angan(imajinative variation) ataupun cerita sistemis(sistemis descriptition) mencari totalitas arti yang membolehkan serta lewat deskriptif yang divergen (devergent perspective), memikirkan kerangka referensi atas seluruh (phenomenom) serta mengkontruksikan gimana pertanda itu dirasakan.
- e. Peneliti setelah itu mengkonstruksikan semua uraiannya mengenai semua arti serta akar pengalamannya.
- f. Peneliti mengutarakan pengalamannya, serta setelah itu diiringi pengalaman semua kontestan..

5. Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini mengikuti konsep Kuswarno²⁷ yakni dengan membangun kebenaran dari fenomena dalam penelitian itu dimulai dari persepsi peneliti sendiri, sebagai orang yang membuat sintesis hasil penelitian. Cara-cara yang dilakukan dengan mengasah intuisinya demi mencapai pemahaman yang hakiki yaitu dengan:

- a. Merefleksi diri kedalam arti sebuah insiden yang dicermati dengan cara berkepanjangan Misalnya apakah ada ataupun tidak ada faktor marah?
- b. Memohon opini dari mereka yang tidak ikut serta dalam semua cara riset)
- c. Membuat keabsahan intersubjektif
- d. Mencampurkan uraian dalam interaksi sosial, misalnya dengan orang pakar, dosen, sahabat sejawat dan lain- lain.
- e. Memohon umpan balik dari informan

I. Rencana Pembahasan

Peneliti akan membahas dan mengupas data penelitian yang di telah terkumpul dengan saksama, untuk mengurai habis sebagai jawaban dari rumusan masalah yang di dapat dari lapangan yakni beberapa perguruan tinggi, tokoh dan ahli tentang kurikulum yang mempunyai hubungan dengan pembahasan masalah gender dan materi-materi gender yang diajarkan dalam pembelajaran pada matakuliah lainnya.

²⁷ “Kuswarno, Engkus, *‘Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),h. 75

Dampak dari penelitian ini sangatlah penting dan berpengaruh terhadap perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi kampus. Manfaatnya pun akan langsung dapat dirasakan civitas akademika dan negara serta masyarakat.

J. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian yang berjudul Strategi Penerapan Kurikulum Responsif Gender pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam negeri Di Indonesia menuju kampus ramah perempuan, khusus pengumpulan datanya dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Juni, namun sebelumnya perancangannya sudah dimulai dengan perencanaan yang matang dengan membaca pedoman penelitian tahun 2022 mengidentifikasi masalah-masalah, merumuskan masalah, mendiskusikan strategi penyusunan proposal, penyusunan proposal dan membuat drap dana, mengumpulkan teori-teori

Jika semua data terdokumentasi akan dilakukan pengelolaan data, lalu data .di bahas, dianalisa dengan mendalam, sesuai dengan metodologi yang disusun. Setelah hasil penelitian sudah tersusun maka akan diadakan FDG untuk mempertajam hasil analisa.

BAB II KAMPUS RESPONSIF GENDER

A. Indikator Perguruan Tinggi Responsif Gender

1. Pengertian Gender

Kata gender merupakan pelabelan untuk laki-laki dan untuk perempuan, yang dikonstruksikan demikian untuk tidak membedakan jenis kelamin yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Kata gender dimaknai berbeda dari jenis kelamin atau biologis. Sebab jenis kelamin identik dengan kebutuhan biologis merupakan pemberian Tuhan sejak dilahirkan. Kata gender bisa dimaknai seperangkat peran, seperti kostum dan topeng di teater, terkait sikap feminin dan sikap maskulin.²⁸ Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku.

Women studies ensiklopedia gender dipahami sebagai suatu konsep kultural, perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.²⁹ Dari makna inilah yang sesuai dengan tuntutan bahwa pendidikan tidak boleh bias gender, dalam pendidikan harus responsif gender. Perbedaan nilai dan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang disebut

²⁸ Hartian Silawati(Penerjemah), Gender & Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, h.3

²⁹ [http://defenisi.pengertian.blogspot.com/2010/05/pengertian gender.html](http://defenisi.pengertian.blogspot.com/2010/05/pengertian%20gender.html)

gender³⁰. Asal kata gender sendiri dari bahasa latin, yakni *genus*, yang berarti jenis atau tipe, sifat dan perilaku yang ada pada laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara sosial dan budaya.

Gender yang jelas mempunyai arti yang berbeda dengan pengertian jenis kelamin, karena keadaan saat individu dilahirkan secara biologis laki-laki atau perempuan sehingga secara sosial ciri sebagai laki-laki dan perempuan berdasar atribut-antribut maskulinitas dan feminitas serta nilai nilai atau sistem dan simbol di masyarakat dimiliki. Sehingga secara singkatnya gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial dan sek yang membuat peran dan perilaku sosial. Menurut Ilmu sosiologi dan antropologi bahwa perilaku dan peran antara laki-laki dan perempuan itu sudah terkonstruksikan atau terbentuk pada masyarakat dan pada waktu tertentu.

Pemaknaan gender³¹ sebagai rangkaian karakteristik yang melekat dan untuk membedakan kondisi atau sifat maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks). Berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial seperti peran gender), atau identitas gender, untuk orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan dikelompokkan kedalam masyarakat *nonbiner* atau *genderqueer*. Sedangkan dalam kebudayaan yang memiliki peran gender secara spesifik namun berbeda dari laki-laki dan perempuan pada umumnya disebut dengan jenis *gender* ketiga, yang termasuk dalam golongan ini adalah *Bissu* di masyarakat Bugis di Sulawesi dan orang *hijra* di Asia Selatan. Menurut seksolog Selandia Baru yakni John Money bahwa perbedaan penggunaan istilah jenis kelamin biologis dan gender sebagai peran terjadi pada tahun 1955. Dan sebelumnya kata gender hanya digunakan untuk gender gramatikal dalam ilmu bahasa. Diakhirnya pada dekade 1970-an baru kata gender sering digunakan ketika teori feminis mengangkat konsep perbedaan antara jenis kelamin biologis dan gender sebagai konstruksi sosial. Makna tersebut masih digunakan untuk beberapa konteks dalam ilmu sosial dan beberapa dokumen dalam Organisasi Kesehatan Dunia.

Disisi lain istilah gender kerap kali digunakan sebagai pengganti dari jenis kelamin". Yakni dalam kajian tentang hewan, *gender* untuk sebutan bagi jenis kelamin hewan. Perubahan makna gender dapat ditelusuri hingga dekade 1980-an. Tahun 1993 pada acara *Food and Drug Administration* yang disingkat (FDA) kata

³⁰ .https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/pengertian_gender.html

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gender>

gender digunakan sebagai istilah *jenis kelamin* (bahasa Inggris: *sex*). Lalu pada tahun 2011, FDA kata *gender* digunakan untuk *jenis kelamin/seks* untuk klasifikasi biologis dan *gender* untuk representasi diri seseorang sebagai laki-laki atau perempuan atau untuk merespon terhadap institusi-institusi sosial yang didasarkan pada presentasi *gender* seseorang.

Di berbagai disiplin ilmu tentang *gender*, seperti ilmu sosial kajian *gender*, Seksologi dan ilmu saraf juga membahas beberapa hal mengenai *gender* pada umumnya membicarakan *gender* sebagai sebuah konstruksi sosial sementara dalam ilmu alam yang dibicarakan mengenai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dapat mempengaruhi perkembangan *gender* pada manusia. Keduanya berkontribusi dalam pembahasan mengenai seberapa dalam perbedaan biologis yang dapat mempengaruhi pembentukan identitas *gender* pada seseorang. Trikotomi antara jenis kelamin biologis, *gender* psikologis, dan peran *gender* sosial pertama kali muncul pada sebuah artikel jurnal mengenai transseksualisme pada tahun 1978.³²

Gender dalam bahasa Prancis *genre* (seperti pada *genre sexuel*). Dan menurut Oxford English Dictionary edisi pertama tahun 1900 arti awal *gender* sebagai "jenis" sudah tidak lazim dipakai. Kata *gender* masih dipakai luas dalam linguistik untuk menyebut *gender* gramatikal (pengelompokan kata benda *maskulin*, *feminin*, dan *netral*). Adapun *gender* diartikan secara akademis dalam konteks peran sosial laki-laki dan perempuan sekitar tahun 1945. Gerakan feminis tahun 1970-an kemudian mengembangkan dan mempopulerkan kata tersebut. Kata *gender* banyak digunakan sebagai pengganti dari kata *seks* atau *jenis kelamin* (sebagai kategori biologi), meskipun terdapat beberapa pihak yang berusaha mempertahankan perbedaan di antara keduanya. Sedangkan dalam hukum diskriminasi, *seks* dan *jenis kelamin* yang bermakanakan biologis yang paling sering digunakan dibanding *gender* sebab norma terkonstruksi secara sosialnya lebih terbuka penafsiran pemaknaannya. Pakar hukum Amerika Serikat, Julie A. Greenberg, menyatakan bahwa meskipun *gender* dan *seks* adalah konsep yang terpisah, namun kedua kata tersebut memiliki keterikatan dengan diskriminasi *gender* sering kali terjadi akibat dari stereotipe masing-masing seks.

Identitas gender merupakan identifikasi personal seseorang terhadap *gender* dan peran *gender* tertentu dalam masyarakat. Sedangkan *Identitas sosial* merupakan

³² <https://id.wikipedia.org/wiki/Gender>

identifikasi umum terhadap sebuah perkumpulan orang atau sebuah kategori sosial yang menimbulkan kebudayaan yang sama dikalangan para anggotanya. Di kalangan masyarakat duni perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menyusun ekspektasi-ekspektasi sosial yang menentukan mana perilaku yang "pantas" bagi laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya mengarah pada hak dan kewajiban, serta jabatan dalam masyarakat. Sehingga sistem norma dan kepercayaan mengenai gender berbeda-beda dalam masing-masing kebudayaan dan tidak ada standar universal maskulin atau feminin yang berlaku. Sementara masyarakat adalah bagian dari suatu set nama dan label ontologi dan epistemologi. Sehingga seorang perempuan digolongkan sebagai wanita yang diartikan lemah, emosional, irasional, dan tidak mampu melakukan tindakan. Menurut Butler gender dan seks lebih menyerupai kata kerja dibandingkan kata benda sebab perilaku yang dilakukan perempuan menjadi terbatas, tidak dibolehkan untuk menyusun gender dan seksnya sendiri. Hal tersebut terjadi karena gender dikendalikan secara politis dan sosial.

2. Responsif Gender di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi³³ bisa di katagorikan ke dalam perguruan yang responsif gender jika di perguruan tinggi tersebut mempunyai, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) profil gender, Peraturan Rektor dan Satuan Oprasional Prosedur (SOP) tentang pencegahan, penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual, mempunyai Unit Layanan Terpadu (ULT). Standar mutu pendidikan (kurikulum/Satuan Acuan Pembelajaran berbasis gender), pengabdian masyarakat responsive gender, dan tata kelolah yang responsive gender.

Seluruh civitas akademika harus berperan secara bersama-sama merencanakan-mengevauasi kegiatan Tri darma Perguruan Tinggi agar responsive gender dan aktif melakukan pencegahan terjadinya pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki samapai berstatus zero.³⁴ Sebab menurut fakta dilapangan perempuan khususnya yang status mahasiswi masih sering mengalami perlakuan diskriminasi bahkan sampai terjadi kekerasan dan pelecehan baik secara verbal maupun non verbal di lingkungan kampus yang nota bene pelakunya juga insan yang berkecimpung di kampus dan ataupun di luar kampus. Maraknya perlakuan diskriminasi, kekerasan dan pelecehan

³³ Menurut kementerian Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)

³⁴ <https://www.umsu.ac.id/2020/02/23/umsu-satu-satunya-pt-responsif-gender/di> kunjungi 23 Desember

di lingkungan kampus menjadi perhatian dari berbagai pihak baik para akademisi maupun pemerhati perempuan.

Sudah saatnya para akademisi harus berpartisipasi mencegah berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kampus dengan memulai dari tata kelola perguruan tinggi sampai pembenahan kurikulum. Pengintegrasian gender di perguruan tinggi ini diperlukan untuk menghilangkan perbedaan kepada perempuan, menjamin hak-hak perempuan dan menjamin adanya kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam bidang pendidikan. Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pemerintah mengimbau agar pengintegrasian gender di perguruan tinggi khususnya di Perguruan Tinggi Keislaman Negeri (PTKIN) melalui unit PSGA yang telah dibentuk untuk melaksanakan kegiatan workshop, pelatihan, mendata, mendukung dan mendanai kegiatan PSGA yang ada di lingkungan PTKIN. Adapun indikator kampus khususnya PTKIN dikatakan responsif gender jika memiliki³⁵

- a. Pusat studi gender dan perlindungan anak atau sejenisnya
- b. Profil gender perguruan tinggi
- c. Peraturan Rektor tentang implementasi PUG di perguruan tinggi
- d. Pendidikan dan pengajaran responsif gender
- e. Penelitian responsif gender (*cluster gender mainstreaming*)
- f. Pengabdian Masyarakat terintegrasi gender
- g. Tatakelola perguruan tinggi yang responsif gender
- h. Peran serta civitas akademika dalam perencanaan, sampai evaluasi tridarma perguruan tinggi yang responsif gender
- i. Zero tolerance kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki
- j. Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dalam kurikulum
- k. Fakultas mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) atau mata kuliah lain yang terkait.
- l. Fakultas melalui prodi mendorong penulisan-penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual.
- m. Penyelenggaraan Workshop, Diskusi, Konferensi. Seluruh komponen kampus menyelenggarakan workshop, diskusi, konferensi dan sejenisnya dalam rangka pencegahan kekerasan seksual.
- n. Memaksimalkan Edukasi Anti Kekerasan:

³⁵ Punika Mba. Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat..

- 1) Pencegahan kekerasan juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan edukasi melalui berbagai media, terkait dengan tema anti kekerasan pada kegiatan kampus di antaranya pada saat:
- 2) Pada kegiatan PBAK dan Sosialisasi Pembelajaran
- 3) Pembekalan KKN dan PLP/PPL/PKL
- 4) Diskusi Konsorsium keilmuan
- 5) Pembinaan pegawai/karyawan
- 6) Sosialisai dan publikasi lewat iklan, banner, running teks, radio , website dan media sosial.
- 7) Membentuk peer group, focal point, konseling teman sebaya, iklan dan media

B. Payung Hukum Penerapan Kurikulum Berbasis Gender

Di tataran beberapa negara di dunia, perlindungan terhadap perempuan di dengungkan berkali-laki dalam bentuk deklarasi, seperti deklarasi Kairo pada 05 Agustus tahun 1990 negara-negara anggota *the organization of the Islmic conference* atau yang dikenal dengan Organisasi konferensi Islam (OKI) tentang perlindungan hak asasi manusia; kelompok hak sipil dan politik: mengenai prinsip non diskriminasi-pengakuan terhadap prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan baik dalam ranah publik maupun dalam ranah domestik- dan prinsip kesetaraan semua manusia, kelompok hak ekonomim sosial dan budaya dan kelompok hak-hak humaniter.³⁶ hak dalam beberapa Desakan kepada perguruan tinggi khususnya PTKIN oleh Komnas perempuan beserta aliansi penggiat perempaun agar kurikulum berbasis gender perlu diterapkan pada setiap pendidikan Tinggi menuju kampus ramah perempuan dan anak sesuai amanat konstitusi, yakni berdasarkan

1. Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³⁷
3. Undang-undang No 7 tahun 1994 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan³⁸
4. GBHN 1999- 2004(Tap MPR No IV tentang GBHN mengenai kedudukan dan peranan perempuan.³⁹

³⁶ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, h. 3

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, h 12

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1994 tentang mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan h 23

³⁹ Tap MPR No IV 1999 tentang kedudukan dan peranan perempuan

5. Undang-undang Nomer 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, keadilan dan kesetaraan gender
6. Undang-Undang No 25 Tahun 2000 mengenai Propenas serta Perjanjian Forum Pendidikan Dunia di Dakar pada bulan April 2000 mengenai pembelajaran buat seluruh, yang salah satu komponennya merupakan kesetaraan laki-laki dan perempuan, inklud di dalamnya metode merumuskan kurikulum yang berplatform pada kesetaraan laki-laki dan perempuan.
7. Instruksi Presiden Nomer 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam membangun nasional menginstruksikan agar setiap institusi pemerintah melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pembangunan⁴⁰
8. *Milennium Development Goal* atau MDG's (KPPPA 2015) bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu dari delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati.
9. Keputusan direktur jenderal pendidikan Islam kementerian agama RI tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi Keagamaan Islam.
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 571 tahun 2020 tentang kelompok kerja pengarusutamaan gender kepada kementerian agama

Perlindungan terhadap perempuan juga berdasarkan agama, bagi agama Islam, bersandar pada makna tersirat dari nash al-Qur'an maupun hadist, yang sejalan dengan tujuan ditegakkannya hukum (*al maqhashid al syari'ah*) yakni *hifzi a-l nafs, al din, al 'aql, al nasl* dan *al amal*. Di lingkungan masyarakat khususnya kampus dalam lingkup perguruan tinggi sebagai pencetak generasi penerus yang berilmu dan bermartabat wajib melakukan kegiatan akademik yang responsive gender sehingga tercipta kampus yang ramah terhadap semua civitas akademika khususnya perempuan dan anak.⁴¹ Pemahaman ini dituangkan dalam makna tersirat al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw Rasulullah.⁴²

⁴⁰ Instruksi Presiden RI Nomer 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, h. 7

⁴¹ Asgar Ali Enginer, Hak-hak Perempuan Dalam Islam terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asegaf, (Yogyakarta Lembaga studi Pengembangan Perempuan dan Anak 1994), h 55

⁴² QS. Al-Baqarah ayat 187 dan Al Ahzab .35 Yang dimaksud dengan Muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Namun janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٠٦﴾

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Menurut Abbas Karafat sebagaimana dikutip oleh Nashruddin Baidan⁴³ bahwa Nabi Muhammad memerintahkan umatnya agar supaya pendidikan perempuan diperhatikan agar pengetahuan yang didapatnya melalui mendidikan dapat mengantarkan perempuan tersebut berhasil membina, dan mendidik anak-anaknya sehingga terhindar dari perbuatan zalim dan dari siksa api neraka, sebagaimana Sabda Rasulullah dalam hadis ini

الام مدرسة اولى اذا اعدتها اعددت شعبا طيب الاعرق

⁴³ Umar Argumentasi Persepektif Kesetaraan Gender. Jakarta Paramadina 2001

“Ibu merupakan sekolah, tempat pendidikan pertama, bila anda mempersiapkannya secara baik, itu tandanya anda telah mempersiapkan generasi penerus agama dan bangsa yang integritas kepribadian yang baik”.

Islam telah memberi aturan terkait peran dan fungsi dibalik penciptaan laki-laki dan perempuan di muka bumi ini. Walau kadang ada yang sama dan ada juga yang berbeda, perbedaan dan persamaan pada pembagian peran dan fungsi masing-masing bukan patokan adanya kesetaraan atau ketidak setaraan gender. Pembagian tugas sama pentingnya didalam mewujudkan kehidupan masyarakat, dalam menggapai kebahagiaan yang hakiki. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kadar yang ditentukan itu sama bagi seluruh individu baik laki-laki maupun perempuan sebab manusia itu satu kesatuan.⁴⁴

Sama halnya dalam pendidikan laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama, dan dengan posisi yang sama pula dalam perlakuan, oleh karenanya dalam memahami pribadi laki-laki dan perempuan bagi keduanya juga harus sama, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Tapi-tiap warga Negara berhak memperoleh pengajaran yang layak⁴⁵ Terkait dengan hak-hak perempuan Imarah dalam Nasr Hamid Abu Zayd mengatakan bahwa “Perempuan Muslimah telah mengambil seluruh haknya sejak lebih dari empat belas abad yang lalu. Islam memberikan kepadanya kebebasan untuk memiliki dan membelanjakan kekayaan yang dimilikinya itu, bahkan kekuasaan di pasar, dalam bidang agama, berjihad dan mengobati tentara yang terluka.⁴⁶

Pendidikan yang responsif gender dengan memberlakukan kurikulum berbasis gender adalah sebuah bukti bahwa dalam dunia pendidikan tidak membedakan perempuan dan laki-laki dan terus berusaha membongkar stereotip yang timpang. Pendidikan responsif gender melalui kurikulum berbasis gender bukanlah upaya perempuan melawan laki-laki akan tetapi agar pemahaman tentang *mubadalahnya* perempuan dan laki-laki seimbang melalui pendidikan. Lalu perempuan dapat mendapatkan kesetaraan nonkodrati, perlindungan, pelayanan dan kesejahteraan sepanjang masa sesuai fokus agenda pemerintah dalam mengupayakan persamaan gender.⁴⁷ Yakni perlindungan terhadap kaum perempuan dari kekerasan, kejahatan dan tindakan yang ekstrim. Peningkatan kualitas hidup perempuan sesuai dengan indeks pembangunan manusia. Dan memajukan serta

⁴⁴ Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan. (Jakarta: Amzah. 2008). h. 13-18 73

⁴⁵ Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁶ Nasr Hamid Abu Zayd, Dekonstruksi Gender Kritik Wacana perempuan dalam Islam, (Yogyakarta: SAMHA; 2003), h. 19. 74

⁴⁷ A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, (Magelang ; Indonesia tera, 2004) h. 221

mengembangkan perempuan disetiap bidang, politik, ekonomi maupun sosial. Lalu memastikan bahwa tatanan kehidupan Undang-Undang dan peraturan lainnya harus adil, tidak bias gender, dan tidak diskriminatif.

Jika pemahaman tentang perempuan tidak diajarkan diperguruan tinggi melalui kebijakan kurikulum berbasis gender lalu berkontribusi perguruan tinggi yang paling tepat apa dalam rangka menghapus ketimpangan gender sebagaimana yang diamanatkan oleh bangsa dan Negara. Program pemerintah tersebut mustahil tercapai jika kurikulum yang ada di perguruan tinggi tidak responsif gender, sebab institusi pendidikan itu merupakan salah satu tempat yang strategis dalam mengupayakan dan mendekonstruksi ideologi segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan dimasa kini dan akan datang, dimanapun mereka berada serta di setiap strata kehidupan. Dalam lingkungan berbasis *critical education*) sangat memungkinkan dapat membantu perempuan memahami pengalaman dan menolak ideologi serta norma yang salah tentang perempuan itu sendiri, dengan demikian akan melahirkan gagasan dan nilai yang baik yang dapat menjadi dasar transformasi gender.⁴⁸

Adapun ciri-ciri implementasi kurikulum responsif gender, antara lain, adalah semua peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh pengalaman belajar, materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber dan tidak bias gender,⁴⁹ dan menekankan pada partisipasi yang sama semua peserta didik dalam proses transmisi dan transformasi pengalaman belajar. Dalam proses pembelajaran juga harus menganut azas memanusiakan manusia, mengingat proses pendidikan merupakan proses pengembangan dan potensi diri yang tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan dalam Islam disejajarkan haknya dalam memperoleh dan perlakuan dalam menuntut ilmu. Masing-masing memiliki hak untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan, berupa berbagai jenis pengetahuan, sastra, dan budaya. Rasulullah saw bersabda ,“ **menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim** “ (HR. Bukhari).

Hal yang demikian itu dirapkan pada zaman Rasulullah saw dan dilanjutkan pada Khulalafaur Rasyidin. Hal itu terbukti, dimana Aisyah mendalami ilmu pengetahuan dan menjadi perempuan yang paling berilmu pada masanya. Oleh karena itu, Urfan Bin Zabair berkata tentang Aisyah “Saya tidak menemukan orang yang sangat menguasai ilmu-ilmu

⁴⁸ Erni P dan Hanun As, Bias Gender dalam Pendidikan Islam(Surabaya, Alpa Beta, 2005) h. 30

⁴⁹ Fakih Mansoer, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006) h. 12

faqhi, kedokteran, dan syair selain Aisyah, serta perempuan-perempuan lain diperlakukan sama dengan laki-laki. Dan demikian juga dalam mendapatkan hak bekerja.

Dengan demikian jelas sekali bahwa Islam menginginkan keadilan gender dengan mendukung kampus mengintegrasikan gender kedalam kurikulum, sehingga kedua jenis kelamin yang berbeda itu memperoleh pengetahuan, pemahaman tentang diri perempuan dan diri laki-laki, pendidikan yang layak serta seimbang ini dapat mengantarkan pada perasaan saling menghargai, dapat berjalan seiring dalam berbagai aspek kehidupan. Membiarkan kaum perempuan hidup dalam kebodohan merupakan kezaliman yang nyata mengingat kaum perempuan merupakan pondasi awal dalam membangun, menumbuhkan kembangkan generasi penerus bangsa dan agama, peran kaum perempuan sangat penting dan urgen dalam mendidik anak-anak bangsa. Jika abai akan keberadaan perempuan maka Negara akan rugi besar dan perbuatan pengabaian itu jelas bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.

Pendidikan bagi perempuan sangat penting bagi dirinya dan juga generasi penerus bangsa, dengan demikian dapat diartikan bila dilihat dari tugas dan fungsi seorang perempuan yang menjadi istri dan ibu dalam rumah tangga sangat penting khususnya pendidikan pertama bagi anak-anaknya, dan juga pergaulannya dalam masyarakat. Tugas-sebagai perempuan, sebagai pendidik pertama bagi generasi bangsa dan agama maka dapat perempuan dapat melaksanakannya dengan baik dan mudah. Mengingat tugas-tugas perempuan semakin kompleks sebagaimana perkembangan zaman, oleh karenanya pemahaman, ilmu pengetahuan tentang gender sangatlah penting apalagi jika dikaitkan dengan pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan agar mereka dapat mengetahui banyak hal khususnya tentang diri mereka sendiri mutlak adanya.

Perempuan yang tidak mendapatkan pengetahuan, pemahaman baik pengetahuan tentang kegenderan khususnya keperempuan itu sendiri maupun ilmu pengetahuan lainnya mengantarkan perempuan tidak dihargai baik oleh lawan jenisnya maupun sesama jenisnya, tidak bisa melaksanakan perannya dengan baik, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, dengan keadaan yang demikian, maka perempuan akan mengalami keterbelakangan, di bully, dilemahkan dan rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual dalam rumah tangga maupun di luar rumah. Untuk itu perempuan harus terdidik dengan baik, dengan memberikan kesempatan pendidikan pada perempuan secara merata agar tujuan pendidikan bagi masyarakat Indonesia bisa dikatakan berhasil.

Keberhasilan pendidikan bagi perempuan itu merupakan keberhasilan bangsa dalam mengembangkan pendidikan di masa yang akan datang bagi generasi penerus bangsa sebab

perempuan merupakan yang akan melahirkan generasi bangsa, seorang perempuan juga merupakan ibu yang berperan sebagai pendidik pertama dan utama bagi generasi bangsa. Ibu adalah sekolah bagi generasi penerus bangsa yang tidak mengenal lelah, biaya, waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala sudut pandang.

Pendidikan dengan kurikulum yang tidak berbasis gender maka dapat dipastikan pendidikan itu menghasilkan kesenjangan pemahaman tentang gender yang berbuah pada tidak ada kesalingan dalam menjalankan peran antara laki-laki dan perempuan. Apalagi jika pendidikan yang dalam kurikulumnya hanya menonjolkan keradaan dan kekuasaan satu jenis kelamin yakni jenis kelamin laki-laki saja, maka dampaknya bagi generasi penerus bangsa tidak akan signifikan mengingat laki-laki bukanlah pelaku pendidik pertama bagi generasi bangsa, karena peran laki-laki dan atau bapak dalam rumah tangga bukanlah sebagai pendidik utama. Sebaliknya keberadaan perempuan sangat signifikan pengaruhnya terhadap generasi penerus bangsa (anak-anak yang dilahirkan) dan bahkan bagi anggota keluarga besar yang ada dalam rumah tangga itu, mengingat bahwa peran perempuan sangat penting dalam membentuk karakter, dan pengetahuan anak. Masyarakat sangat paham bahwa anggota keluarga sukses dalam pendidikan lebih disebabkan oleh ketekunan seorang perempuan yang sering disebut dengan sebutan sebagai ibu karena keuletannya dalam mendidik anak.

Oleh karenanya perempuan harus dibekali dengan pengetahuan melalui pendidikan yang layak dan baik dalam memahami jenis dirinya dan bukan jenisnya, bekal pengetahuan tersebut akan didapat melalui kurikulum yang diterapkan di perguruan tinggi, khususnya kurikulum terintegrasi gender. Perlu pemahaman dan pengingatan yang baik bahwa sistem pembelajaran dan kurikulum yang tidak terintegrasi gender itu tidak berpihak pada perempuan sehingga kaum laki-laki sering menganggap remeh serta tidak menghargai perempuan dalam banyak tempat, sehingga perempuan menjadi lemah, tertindas dan tertinggal, kenyataan seperti ini akan mewariskan kepada generasi yang bodoh dan lemah. Hasil penelitian memang belum ada yang menyatakan bahwa manusia yang berjenis kelamin laki-laki dilahirkan memang sudah cerdas.⁵⁰ Dengan demikian jelas sekali bahwa kecerdasan itu didapat dari sistem pendidikan bukan karena jenis kelamin. Al-Quran dan Hadis Nabi menjelaskan bahwa perempuan mempunyai peluang yang sama

⁵⁰ 'Bustamin, "Menggali Isu Gender dalam Kurikulum Hadis dan Ulumul Hadis", dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, Departemen Agama, UIN Syarif Hidayatullah, CIDA dan McGill, 2005), hal. 80.

dengan laki-laki dalam menuntut ilmu dan berpendidikan.⁵¹ Inilah konsekuensinya yang harus diambil dalam rangka mengimplementasikan nilai kemanusiaan yang sejati dengan memberikan kesetaraan dan atau berlaku tidak bias gender.

Seorang perempuan sama dengan seorang laki-laki yang harus mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan setinggi tingginya. Banyak statment yang melaporkan kalau pria serta wanita memiliki pertemuan dalam pembelajaran, antara lain dikemukakan oleh Athiyah begitu juga diambil oleh Roqib kalau jeritan Islam hendak terdapatnya kebebasan, pertemuan, serta peluang yang serupa antara sang banyak serta sang miskin dalam seluruh aspek tercantum dalam aspek pembelajaran tidak hanya itu penghapusan sistem kategori, mengharuskan bagi muslimin dan muslimat dalam menuntut ilmu, bagaimanapun caranya, dengan tidak mengabaikan bakat dan minat yang bersangkutan.⁵²

Pendidikan berbasis gender yang dituangkan dalam kurikulum berbasis gender akan diterima oleh anak yang bersatatus sebagai mahasiswa nanti akan dapat mengantarkan orangtuanya selamat dari siksaan neraka, sebagaimana Hadis nabi Muhammad, yang bermakna begini “Sekolah dan pendidikan pertama bagi anak-anak adalah Ibunya, maka jika seorang ibu mempersiapkan pendidikan bagi anak-anaknya dengan baik, berarti ibu telah menyiapkan keturunannya dan sebagai generasi bangsa yang mempunyai kepribadian, karakter dan moralitas yang unggul.

Jadi sangat jelas bahwa ajaran Islam tidak membolehkan adanya bias gender terhadap pendidikan bagi anak-anak dan atau generasi penerus. Semua generasi dan anak mempunyai hak yang sama dan seimbang sehingga mereka dapat menjalani dan menghadapi persoalan hidup di dunia dan akhirat dengan baik.⁵³ Sikap cuek dan tak peduli terhadap pendidikan perempuan seperti kurikulum yang ada di perguruan tinggi tidak mengakomodir materi atau kurikulum yang berbasis gender itu sama saja dengan membiarkan perempuan terjebak dalam kegelapan karena bodoh, tidak bias mengembangkan potensi yang perempuan miliki dan perbuatan yang demikian ini adalah bentuk kezaliman yang nyata.⁵⁴ Kezaliman tersebut akan merugikan generasi bangsa dan potensi negara untuk maju dan melanggar aturan al-Qur'an dan Hadis Nabi .

⁵¹ Dipahami dari Al-qur'an Surat al-Mujadalah ayat 11.

⁵² Roqib, Pendidikan Perempuan (Yogyakarta: Gama Media dengan STAIN Purwokerto, 2003)h. 48-49.

⁵³ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 33.

⁵⁴ Kurikulum Berbasis Gender, Iswah Adriana. ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/249/240

Dari paparan di atas bisa dipahami kurikulum dan pembelajaran berbasis gender sangat penting bagi setiap jenis kelamin khususnya perempuan untuk dapat dihargai saat melaksanakan peran dan fungsinya dalam keluarga, sebagai warga negara serta di ranah public. Bukan rahasia umum lagi bahwa perempuan mempunyai banyak peran yang sangat penting di dalamnya, peran penting itu tidak bisa terlaksana dengan baik dan sempurna jika tanpa pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan dan pengetahuan tersebut biasa didapat melalui pendidikan yang diperoleh di bangku kuliah yang kurikulumnya berbasis gender. Tugas dan tanggungjawab perempuan yang begitu banyak baik sebagai isteri, ibu, anggota keluarga, dan masyarakat dalam membentuk karakter generasi penerus yang bertangan lembut penuh kasih sayang apalagi di zaman yang sangat modern, canggih dan pesat perkembangan baik teknologi maupun sains, sudah seharusnya dunia pendidikan menerapkan kurikulum berbasis gender, sehingga keadilan gender dapat terwujud dengan baik terlebih pengetahuan tentang perempuan. Perlu diingat bahwa jika pemahaman tentang gender tidak ada maka sudah dapat dipastikan pemahaman tentang perempuan terabaikan dengan demikian perempuan tidak akan sanggup menjalankan perannya, baik sebagai individu dalam keluarga maupun sosial. Anak keturunan yang sukses itu jika dia mendapatkan pendidikan dari seorang perempuan yang berpemahaman gendernya tinggi dan baik dengan pendidikannya. Jadi pendidikan perempuan sebagai calon ibu melalui kurikulum berbasis gender di dapat di bangku kuliah atau disekolah akan mengantarkan kesuksesan bagi masa depan generasi penerus bangsa yang saling menghargai satu dengan lainnya khususnya pada jenis kelamin yang berbeda, untuk meningkatkan rasa keseimbangan, kebersamaan dan kesalingan antar jenis kelamin. Inilah makna tersirat yang dipahami dalam prinsip Islam, maupun hukum positif.⁵⁵

C. Kurikulum berbasis gender

Dalam dunia pendidikan formal, sering ditemui perlakuan bias gender dalam perumusan kurikulum. Kurikulum pendidikan di perguruan tinggi bahkan diperguruan tinggi keagamaan Islam sekalipun masih belum responsive gender, belum ada materi-materi yang dikhususkan atau informasi yang diselipkan dalam pembelajaran mengenai saling menghargai, tidak melecehkan perempuan, memposisikan perempuan dan juga laki-laki, baik dari perspektif agama maupun sosial, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya, di lingkungan kampus masih menonjolkan laki-laki baik kurikulum maupun perlakuan, contohnya jika di sektor publik khusus laki-laki sementara perempuan di sektor domestik.

⁵⁵. Ratna Megawangi, "Sekapur Sirih", dalam *The Tao of Islam*, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam, Terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), hal. 16.

Dengan kata lain, kurikulum diperguruan tinggi baik materi ajarnya belum berbasis gender jangankan gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam pembelajaran kebijakannyapun masih gamang. Realitas ini jelas menghantar pada ketimpangan, diskriminasi terhadap sosok perempuan, perempuan dianggap sosok yang lemah secara fisik dan psikis dibandingkan laki-laki, yang pada akhirnya, citra negative perempuan melakat di berbagai aspe, membudaya seiring sejalan dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Akibatnya sampai zaman 4.0 kurikulum di pendidikan tinggi belum responsive gender dan materi pembelajaran masih timpang, karena perempuan sendiri masih banyak yang belum paham tentang dirinya, pemahaman mubadalahnya masih tidak tersampaikan dengan baik dan benar.

Kesetaraan gender sangatlah penting dipahami bagi semua masyarakat, dan pemerintah agar terbentuknya keseimbangan dan kesalingan, untuk itu para aktifis dan penggiat perempuan mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan agar pendidikan kesetaraan gender dimuat dalam kurikulum, dan atau kurikulum berbasis gender diterapkan di perguruan tinggi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dwi Ruby Khofifah saat diutus di Asian Muslim Action Network (AMAN).⁵⁶ Sebab topik tentang kesetaraan gender ini masih sangat sulit dilakukan di Indonesia dikarenakan pemerintah dan juga masyarakat Indonesia mempunyai pola pikir yang konservatif. Selain itu pendidikan dianggap sangat urgen dijadikan sebagai instrumen untuk menyadarkan masyarakat bahwa hak laki-laki dan perempuan itu setara dalam hak, dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak.⁵⁷ Kaum laki-laki secara dini dia ajarkan dan memahami bahwa menghargai perempuan baik terkait dengan tubuhnya maupun semua yang terkait tentang kesehatan reproduksi yang ada pada perempuan.

Secara umum telah diketahui bahwa masyarakat banyak yang tidak paham bahwa sangat pentingnya memahami anggota reproduksi perempuan dan bahkan masyarakat yang tidak paham akan hal ini sehingga mengkaitkan dengan moralitas,- mereka beranggapan bahwa membicarakan alat reproduksi perempuan tabu, tak bermoral dan melanggar etika ketimuran. Anggapan seperti ini tidak benar sebab salah satu cara meminimalis atau mengurangi tindakan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan adalah dengan memberikan pendidikan seksual melalui kurikulum berbasis gender. Kasus pelecehan dan

⁵⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141112154625-20-11062/kesetaraan-gender-penting-masuk-kurikulum>. Diakses tgl 20 Februari 2022.

⁵⁷ Warni Tune Sumar, Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang pendidikan, (Jurna Musawa Vol 7 No 1 2015),h 158-182

kekerasan seksual dari tahun ketahun meningkat, seperti di tahun 2012 mencapai 654 kasus dan di tahun 2013 meningkat menjadi 992 kasus, khusus kasus kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga merupakan urutan pertama, karena mencapai 43.15%⁵⁸

Kenyataan ini seharusnya pemerintah baik pusat maupun daerah lebih serius lagi menyikapi keadaan ini secara masif dengan cepat membuat kebijakan khusus penanganan, penanggulangan kekerasan dan pelecehan seksual melalui pendidikan berbasis gender dengan memberlakukan kurikulum berbasis gender. Walaupun menurut menurut Deputih Bidang Pengarasutamaan Gender (PUG) kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menerapkan kurikulum berbasis gender tidaklah mudah, karena banyaknya ilmu sains dan lainnya, akan tetapi upaya kearah itu sudah ada dengan memasukan pengetahuan gender ke dalam bahan ajar seperti ilustrasi buku dan gambar.

Namun yang dikehendaki adalah kesetaraan gender mengenai relasi yang sejajaran antara laki-laki dengan perempuan, khusus pada posisi pengakuan persamaan hak, perlakuan, akses dan kesempatan di segala bidang. Kesetaraan gender di dunia pendidikan merupakan representasi kesetaraan gender di kalangan masyarakat, setiap bidang pendidikan harus dibuka lebar baik bagi perempuan dan begitupun bagi laki-laki yang tidak boleh dibatasi.⁵⁹ Yang dimaksud dengan tidak berkesetaraan gender itu berkaitan dengan perilaku atau perlakuan yang diskriminatif secara *de jure* dan atau secara *de facto*.

Dalam konteks pendidikan yang dimaksud dengan diskriminatif secara *de jure* adalah adanya aturan yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam mengikuti atau masuk pada sebuah pendidikan atau program studi tertentu, padahal menurut Undang-undang Dasar tahun 1945 pendidikan untuk semua warga Negara tanpa terkecuali. Sedangkan maksud dari diskriminatif secara *de facto* adalah pemahaman dan mensesetor pemikiran masyarakat yang tertanam bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan terkait bidang pendidikan, ada yang cocok hanya untuk laki-laki dan hanya cocok untuk perempuan. Padahal pemikiran yang seperti ini tidaklah benar jika budaya pemahaman tentang kesetaraan gender dipelajari sejak di bangku sekolah atau perkuliahan. Budaya masyarakat yang berkekerabatan patrilineal sangat kental mengarah pada pemahaman patriarki mutlak, untuk melawan dan mengubah pemahaman patriarki ini

⁵⁸. Lembaga Bantuan Hukum APIK, diakses jam 12, tgl 13 bulan Februari tahun 2022. [Hhttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20141112154625-20-11062/kesetaraan_gender_penting_masuk_kurikulum](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141112154625-20-11062/kesetaraan_gender_penting_masuk_kurikulum).

⁵⁹. Sebagaimana diungkap oleh Niken Savitri, tenaga pengajar Fakultas Hukum dan Gender Indonesia Katolik Parahyangan. Ibid

perlu ada aturan yang mengharuskan penerapan kurikulum berbasis gender di perguruan tinggi khususnya di perguruan tinggi keagamaan, dalam rang mengupayakan rekonstruksi pola pikir dan sudut pandang bahwa betapa pentingnya perguruan tinggi menerapkan kurikulum berbasis gender.

Peran para Akademisi dan Lembaga Riset dalam pengarusutamaan gender sangat diperlukan agar seluruh civitas Perguruan Tinggi dapat menjadi perpanjangan tangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam menjangkau masyarakat luas, terutama melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan serta penerapan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemen kampus yang responsif gender oleh jajaran pimpinan Perguruan Tinggi. Bila kesetaraan gender dapat diwujudkan di Perguruan Tinggi. Sehingga kesempatan perempuan sebagai pembuat keputusan dan menempati posisi strategis di kampus semakin meningkat dan terhapusnya kekerasan dalam kampus secara tuntas. “Isu gender di kampus masih banyak mulai dari pelecehan hingga kekerasan seksual, sehingga peran seluruh elemen kampus sangat dibutuhkan untuk menuntaskannya secara maksimal dan serius, terutama pelibatan laki-laki agar lebih responsif terhadap isu-isu gender. Dengan demikian diharapkan hasil dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) peretumbuhannya merata di Indonesia.⁶⁰

Jika dilihat dari pernyataan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 6 poin (b) bahwa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi atas dasar prinsip demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Lalu pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Dewi Wulandari bahwa pendidikan responsif gender adalah perlakuan yang sama dalam memberi kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan.⁶¹ Kesetaraan gender jangan dipahami sebagai pemberian hak secara khusus dan dispensasi khusus hanya kepada perempuan, akan tetapi hanya sebagai pemberian akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki, dan pengakuan itu juga dibarengi dengan

⁶⁰. Ungkap Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni dalam Workshop Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Perguruan Tinggi untuk Penerapan Perguruan Tinggi yang Responsif Gender yang diselenggarakan pada 4 – 6 Desember 2019 di Depok

⁶¹ Dewi Wulandari dalam seminar di Universitas Negeri Yogyakarta dan sebagaimana diungkap juga oleh Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kemen PPPA, Maydian Werdiastuti.

bukan sekedar kesempatan yang sama yang harus ada namun juga dalam pembelajaran melalui kurikulum responsif gender.

Untuk itu diharapkan pada perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi Islam merespon peraturan tentang imbauan memasukan kurikulum berbasis gender dan mengusahakan pengenalan materi-materi gender dalam proses pembelajaran kepada para mahasiswa semester satu dengan menyelipkan mata kuliah khusus responsif gender dan atau menyelipkan materi responsif gender dalam mata kuliah lainnya yang relevan. Selain itu materi-materi gender bisa juga diberikan awal memasuki kampus saat dilaksanakan acara penyambutan mahasiswa baru. Dan bahkan diakhir masa perkuliahan yang saat kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Langkah pertama pengintegrasikan kurikulum responsive gender atau bisa disebut juga perspektif (*pro gender equality*) dalam management kampus dengan pembenahan kurikulum (content), struktur (organisasi) hingga budaya yang ramah perempuan, kompotitip dan aktual.⁶² Dan subordinasi terhadap perempuan di kampus. Mengingat salah satu tujuan keberadaan kurikulum berbasis gender untuk meningkatkan kesadaran setiap individu manusia akan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari perbuatan yang tidak menyenangkan, seperti tidak dihargai, *bullying*, pelecehan, kekerasan dan sejenisnya. Dengan hadirnya Perguruan Tinggi yang Responsif Gender yakni kampus yang ramah perempuan dan anak, maka dipastikan kesenjangan gender dapat diminimalisir bahkan dapat dihapuskan dan kesetaraan gender bisa terwujud secara baik dan sempurna.

Bukan rahasia umum bahwa kurikulum pendidikan di Negara Indonesia masih sarat dengan patriarki baik secara ideology maupun secara adat, hal in dapat dilihat dari struktur dan kultur pendidikan, lingkungan, sistem pembelajaran dan tampilan teks dan gambar dalam materi-materi atau referensi yang masih sarat dengan muatan bias gender. Dan oleh karenanya sudah semestinya dosen sebagai tenaga pendidik yang berperan sebagai agen perubahan harus lebih bersikap reorentasi atau responsive gender. Dan untuk itu perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam baik Negeri mapun swasta membuat kebijakan dimulai dari penyusunan visi dan misi, yang selanjutnya terimplimentasi melalui kurikulum beserta komponen-komponennya, agar pesan utama pengarustamaan gender di perguruan tinggi terlaksana.

Dalam rangka mendukung penerapan kurikulum berbasis gender di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN

⁶² Aref Furchan, dkk “Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di PTAI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)h 115-116.

Antasari Banjarmasin⁶³ bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk Dosen tentang Penerapan Kurikulum Responsif Gender. Yang dihadiri oleh Kepala Biro AUPKK Drs. Saifi, M. Pd., KPPA Dr. Heru Karsidi, M. Sc., dosen-dosen ada 8 dosen per Fakultas. Menurut Saifi,⁶⁴ kegiatan semacam ini sangat penting karena besar harapan dengan adanya integrasi antara studi responsif gender dan kurikulum, sangat berguna bagi pengembangan kurikulum yang ada, adanya potensi yang kuat untuk menjaga kesetaraan gender dengan benar

Kesetaraan gender di Indonesia berkembang dapat melalui dari kajian-kajian Al-Quran lalu diajarkan pada mahasiswa di kampus keagamaan. Mahasiswa akan membawa nilai dari kajian al-Qur'an tentang kesetaraan gender itu ke dalam masyarakat, sehingga dapat menunjang pembangunan nasional jangka panjang. Selain itu, hasil penelitian dan kajian kesetaraan gender oleh dosen khususnya dapat dijadikan sebagai dasar pembuat kebijakan.⁶⁵ Kemudian kegiatan yang senada oleh Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang diberi tema Implementasi Kurikulum Responsif Gender, acara ini diikuti oleh dekan, wakil dekan, kepala dan sekretaris program studi, serta dosen. Pada kesempatan ini Ketua LP2M menyatakan⁶⁶ bahwa kegiatan ini merupakan salah satu nilai tambah bagi IAIN dalam mempersiapkan akreditasi dan alih status IAIN Salatiga, menjadi UIN pada tahun 2020. Dengan diselenggarakannya workshop penyusunan kurikulum berbasis gender oleh para dosen ini, pemangku kebijakan kurikulum di IAIN Salatiga ini dapat lebih memperhatikan hal-hal yang responsif gender supaya dapat dimasukkan ke dalam kurikulum.

Pimpinan, dosen dan bahkan semua civitas akademika PTKIN harus tahu bagaimana hal-hal yang responsif gender bisa masuk ke dalam kurikulum, harus tahu bagaimana program-program di PTKIN, dalam mendukung program-program pemerintah khususnya Komisi Nasional Perempuan. Dasar pembuatan kurikulum yang responsif gender adalah mengetahui apa saja kebutuhan praktis dan strategis peserta didik. kehadiran kurikulum responsif gender sangat diperlukan karena alasan-alasan seperti pengalaman

⁶³ Diungkap saat kegiatan workshop penyusunan kurikulum berbasis gender Rabu (2018/08/01) UIN Antasari Banjarmasin di Hotel G'Sign

⁶⁴ Saifi dan Saifi membuka acara kegiatan workshop penyusunan kurikulum berbasis gender Rabu (2018/08/01) UIN Antasari Banjarmasin di Hotel G'Sign

⁶⁵ Dr. Wawan Djunaedi dan tema Kebijakan PUG di PTKI oleh Dr. Suwendi, M.A. (Kasubdit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Kemenag RI).

⁶⁶ Ruang Rapat Utama Gedung Hasyim Asy'ari Kampus III IAIN Salatiga, Senin (25/11/2019). Salatiga, Dr. Irfan Hilmy, Lc. M.A.

(mahasiswa) perempuan dan laki-laki dapat berbeda terhadap masalah yang sama, kaum perempuan banyak mengalami ketidakadilan berkaitan dengan keberadaannya sebagai perempuan, dan kesadaran bahwa masalah dan keberadaan perempuan secara metodologis disembunyikan oleh para ilmuwan yang sebagian besar adalah laki-laki.⁶⁷ “Peran gender dalam pembuatan kurikulum adalah sebagai perspektif. Fleksibilitas peran gender adalah kunci kebahagiaan, maka dari itu kurikulum responsif gender perlu diterapkan. Kritik yang bisa dilayangkan terhadap sistem pembelajaran konvensional adalah sistem itu melihat masalah dari kacamata laki-laki saja padahal seharusnya perempuan bisa lebih menguatkan nilai kesetaraan, strategi yang dapat dipakai untuk menciptakan kurikulum responsif gender, yaitu dengan menjadikan kajian gender sebagai mata kuliah tersendiri atau mengintegrasikan kajian gender dalam mata kuliah lain. Perempuan harus lebih mengenali paradigma pedagogi feminis yang menguatkan nilai kesetaraan dan memiliki pemahaman pendidikan tanpa diskriminasi yang melihat guru dan murid sebagai objek bukan sebagai objek. Ingat bahwa perguruan tinggi yang berdaya saing adalah perguruan tinggi dengan kurikulum yang tajam. Maka dari itu kurikulum responsif gender juga harus dipertajam. Untuk itu cara pandang harus berubah sebab kurikulum responsif gender hanya dapat diterapkan jika pandangan kita luas dan global.

D. Makna Kurikulum Berbasis Gender

Kurikulum berbasis gender adalah kurikulum yang mempunyai wawasan gender, yang mana di dalam susunan kurikulum yang diberlakukan di ranah pendidikan perguruan tinggi terdapat materi atau keilmuan terkait gender secara khusus. Elliot berpendapat sebagaimana dikutip oleh Susilaningsih bahwa kurikulum yang mencerminkan konsep, sikap, pandangan proses pembelajaran di ruang kelas, lembaga pendidikan, masyarakat, dan negara mengenai isu-isu tertentu gender.⁶⁸ Oleh sebab itu dalam kurikulum harus tergambar tujuan pendidikan sebagaimana yang telah di desain oleh si pembuat kurikulum dan pemerintah. Secara umum tujuan tersusunya struktur kurikulum pada hakekatnya adalah masyarakat yang adil, tanpa diskriminasi dan subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin.

Pada perguruan tinggi tatacara penyusunan kurikulum tidak lepas dari visi dan misi perguruan tingginya, sebab setiap perguruan tinggi atau lembaga pendidikan menerapkan

⁶⁷ Komisioner Komnas Perempuan Republik Indonesia, Alimul Qibtiyah, Ph.D salah satu pematik dalam acara itu

⁶⁸ Susilaningsih, dkk. Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dengan McGill ISEP, 2004), hal. 31

kurikulum berdasarkan turunan visi, misinya masing-masing, atau dengan bahasa lain kurikulum merupakan aktualisasi dari visi dan misi. Dengan kata lain, kurikulum menggambarkan dan menerjemahkan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Jadi dengan adanya keterkaitan antara visi, misi dengan kurikulum maka sudah dipastikan penerapan kurikulum berbasis gender harus dimbangi dengan penambahan unsur gender dalam visi dan misi, dan inilah tantangan dari pengembangan kurikulum. Lembaga pendidikan merupakan bagian dari implementasi tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Walau corak penerima terhadap tugas tersebut pasti berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Sehingga penerapan sistem pendidikan dan tujuan pendidikan masing-masing masyarakat berbeda juga yang harus timbul dari dalam pengguna pendidikan itu sendiri.⁶⁹

Kurikulum merupakan turunan dari visi dan misi, maka dari itu harus dijabarkan dalam unsur-unsur yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, dan topik perkuliahan bahan bacaan atau referensi yang dipakai, strategi pembelajaran, media atau sarana dan prasarana yang digunakan dan evaluasi. Lembaga pendidikan yang memperhatikan kesetaraan gender akan mencantumkan upaya kesetaraan gender ini sebagai bagian dari visi dan misinya, yang kemudian akan terimplementasikan melalui kurikulum beserta komponen-komponennya. Pada umumnya isi kurikulum adalah nama-nama mata pelajaran beserta silabinya atau pokok bahasan, tetapi kurikulum sebenarnya tidak harus berupa nama mata pelajaran, ia dapat saja berupa nama kegiatan. Inilah pengertian kurikulum yang paling luas dan yang sering dipakai dalam pendidikan.⁷⁰

Faktor-faktor Penyebab perlunya kurikulum berwawasan gender, meskipun pembangunan pemberdayaan perempuan telah mulai dilaksanakan secara terencana sejak tahun 1978, namun data yang ada menunjukkan masih tertinggalnya perempuan dibandingkan dengan laki-laki, tidak terkecuali dalam pendidikan. Dalam hal ini, indikator-indikator yang digunakan adalah angka partisipasi sekolah, angka *melek* huruf, akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, dan muatan buku bahan-bahan ajar.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, "Konsep Pendidikan dalam al-Qur'an", dalam *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2002), hal. 173.

⁷⁰ Pemakaian kata kurikulum sehari-hari dapat diilustrasikan dalam tiga pengertian. *Pertama*, kurikulum dalam arti mata pelajaran pada suatu jenjang pendidikan. Orang tua murid mengatakan, "Saya menyekolahkan anak saya ke sekolah SMAN, karena kurikulumnya baik, ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran pengoperasian komputer". *Kedua*, kurikulum dalam arti silabus. Kata kurikulum dalam pengertian ini digunakan tatkala seorang guru yang baru diangkat, kemudian ia berkata "saya diserahi mengajar mata pelajaran PPKN, tolong saya ingin mengopi kurikulumnya". *Ketiga*, kurikulum dalam arti program sekolah. Ini pengertian kurikulum yang paling luas. Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan*, hal. 102-3.

Dalam kenyataan, perumusan kurikulum yang responsif gender menjadi tuntutan. Hal ini disebabkan oleh adanya perlakuan yang bias dan terkesan menganak tirikan perempuan dan atau perlakuan yang timpang antara perempuan dan laki laki di masyarakat, sehingga menimbulkan dominasi terhadap jenis kelamin tertentu dalam bentuk stereotipe, beban ganda, pelecehan dan kekerasan. Untuk itu perlu bangunan kurikulum yang tidak bias gender⁷¹ di perguruan tinggi. Khususnya di perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia kini.

Kandungan dan muatan referensi atau sumber rujukan pembelajaran harus responsif gender dan tidak bias gender, adanya keberimbangan informasi tentang bagaimana posisi, menghargai, seperti apa pengetahuan yang sebenarnya diantara kedua jenis kelamin itu. Bahan ajar atau buku-buku yang dijadikan referensi dan rujukan dalam pembelajaran mencerminkan kesetaraan gender. Sebagai contoh dalam materi keagamaan tidak mencantumkan maskulinitas atau menjelaskan laki laki juga sebagai makhluk Allah yang tidak lebih sempurna dan kuat dibanding perempuan sehingga tugas yang strategis bisa dilakoni oleh laki-laki dan juga perempuan, artinya tugas tidak ada yang lebih diidentikkan atau yang hanya cocok bagi laki-laki, seperti menjadi seorang pemimpin.

Di zaman yang memasuki masa 5.0 ini sebuah sistem patriarki masih menguasai masyarakat kampus/ akademisi, sehingga masih sering terjadi perlakuan diskriminatif terhadap perempuan baik yang dilakukan oleh sesama dosen maupun dosen dengan mahasiswi dan sebaliknya. Ketua bidang pergerakan Sarinah dan perlindungan anak GMNI, Dia Puspitasari berpendapat bahwa penerapan kurikulum berbasis gender di lingkungan kampus di perguruan tinggi baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan, swasta maupun negeri merupakan program yang berkelanjutan sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan perempuan di lembaga pendidikan khususnya di kampus. Pesan dalam program yang disampaikan melalui kurikulum berbasis gender disebut dengan Program "Kampus Ramah Perempuan" (KRP), program ini merupakan program yang dirancang oleh komnas perempuan yang diperuntukan membantu Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan perempuan di tataran kampus. Program 'Kampus Ramah Perempuan' atau KRP ini dilatar belakangi oleh kondisi kampus yang belum bahkan tidak berpihak pada perlindungan, kebutuhan, dan ataupun kepentingan lain bagi perempuan.

⁷¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.13-17.

Gagasan orientasi Kampus Ramah Perempuan ini memang di haruskan di dunia pendidikan agar perguruan tinggi peka dan responsive terhadap permasalahan perempuan. Permasalahan perempuan harus dimulai dan dijadikan tanggung jawab negara bersama perguruan tinggi dan masyarakat. Untuk itu program yang harus ada di kampus adalah menerapkan kurikulum berbasis gender sehingga dapat menekan atau meminimalisir dan bahkan menghapus kekerasan baik secara verbal maupun perbuatan yang mengarah dan bertendensi pada stereotype terhadap perempuan terutama oleh dosen saat proses perkuliahan, perilaku marginalisasi terhadap pedagang perempuan di kampus dan berakarnya paham bahwa perempuan tidak boleh bekerja terlalu larut malam. Padahal ada perempuan yang menjadi *breadwinner* (pencari nafkah utama) di keluarga. Dengan adanya kurikulum berbasis gender yang ditepkan di perguruan tinggi diharapkan kampus dapat menghapus pemikiran dan atau asumsi yang stereotipe bahwa perempuan itu bodoh, lemah dan miskin.

Secara umum bahwa fenomena perilaku marginalisasi dan diskriminasi serta pemiskinan terhadap perempuan pada hakekatnya tentu tidak sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, Program kampus ramah perempuan harus diterapkan dengan salah satunya menyusun dan menerapkan kurikulum berbasis gender dan mengintegrasikan materi pembelajaran yang perspektif dan di dalam manajemen kampus juga pro gender equality. Untuk itu kurikulum (content), struktur (organisasi), Subordinasi terhadap perempuan hingga budaya yang ramah perempuan di perguruan tinggi harus ada dan dibenahi secara serius oleh civitas akademika di kampus. Misalnya struktur kepemimpinan di perguruan tinggi di dominasi laki-laki dan baik di organisasi kampus maupun kemahasiswaan.

Bentuk penerapan kurikulum berbasis gender salah satunya nampak pada perancangan dan tujuan modul diarahkan ke ramah perempuan dengan meminimalisir kekerasan, pelecehan terhadap perempuan di institusi perguruan tinggi. Yang mana dilapangan, di kampus-kampus telah banyak terjadinya hal buruk seperti pelecehan dan kekerasan saat perkuliahan baik fisik maupun non fisik. Jadikanlah kampus sebagai salah satu tempat perlindungan dan kedamaian bagi warga kampus perempuan penerapan modul ini melalui mekanisme elaborasi gerakan, antara organisasi ekstra kampus dan intra kampus agar strategi gerakan kampus ramah perempuan tercapai. Jika gerakan kampus ramah perempuan yang dirancang melalui hasil sintesa untuk menjawab fenomena kurikulum berbasis gender di kampus. Harus disadari oleh semua pihak kalau sistem pendidikan nasional harus berbasis gender alias perspektif gender. Pusat studi gender, unit

layananan terpadu, ruang laktasi, kurikulum berbasis gender dan sejenis yang dihadirkan di kampus merupakan output dari hadirnya Gerakan Kampus Ramah Perempuan. Koordinasi dan konsultasi ke pihak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan gagasan solutif agar bisa mengakomodir gagasan generasi muda untuk perbaikan kondisi pendidikan dan perempuan di Indonesia.

E. Konsep, Struktur, dan Strategi Penyusunan Kurikulum Berbasis Gender,

Sebuah Negara akan semakin maju dan berkembang apabila tingkat pendidikan dan pengalaman perempuan semakin baik akan semakin baik juga harkat dan martabat keluarga dan keturunannya. Moralitas, harkat, harga diri dan martabat bangsa akan tinggi, lalu disusul dengan adanya kecerdasan anggota masyarakat meningkat begitupun dengan kemakmuran, masyarakat, Negara dan bangsa. Untuk itu penerapan kurikulum berbasis gender di perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri merupakan kewajiban, adapun Strategi dan struktur kurikulum bisa diterapkan melalui beberapa langkah, dapat dipilih sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi masing-masing, adapun empat (4) macam alternative pilihan tersebut adalah:

1. *Contributions Approach*; Kurikulum berbasis gender diterapkan melalui sistem serta kebijakan kampus, yakni isu- isu gender dimasukkan secara resmi atau legal kedalam kurikulum sebagaimana di terapkan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pada kedua perguruan tinggi ini kurikulum responsive gender terdapat dalam beberapa macam mata kuliah secara jelas. Sedangkan di Universitas Indonesia 40- 46 sks, matakuliah perspektif gender.⁷²
2. *Additive Approach*: jika belum dibentuk kebijakan di kampusnya tentang kurikulum berbasis gender, maka penerapan kurikulum responsive gender dengan menambahkan kurikulum tanpa mengubah kurikulum yang ada, yakni gagasan gender ditambahkan kedalam kurikulum yang ada. Dosen yang mempunyai sensibilitas gender atau pengetahuan gender langsung memberikan penjelasan gender saat yang bersangkutan melaksanakan proses pembelajaran di matakuliah yang diampuh. .

⁷²Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2 Agustus tahun 2008, (<http://www.pps.ui.ac.id/ui/kwkurikulum.htm>)

3. *Transformational Approach*; Mengidentifikasi kurikulum yang mengandung kajian atau materi responsif gender. Seperti mata kuliah fiqh munakahat, hukum keluarga, psikologi dan lain-lainya, arah pembahasan tentang tanggungjawab perempuan dan laki-laki lebih strong ke perspektif gender.⁷³
4. *Social Action Approach*: membuat forum-forum atau kelompok diskusi untuk mendiskusikan materi-materi terkait keadilan gender dari berbagai aspek, dengan mengamati fenomena di masyarakat tentang gender, seperti adanya diskriminasi terhadap gender, ketidakadilan gender, apa sebab dan akibat, sikap dan tindakan yang diambil.⁷⁴

Singkat kata, penerapan kurikulum berbasis gender dilakukan dengan menjadikan matakuliah responsive gender mata kuliah mandiri, memasukan isu atau materi gender pada RPS matakuliah tertentu. Dan menyelipkan isu dan atau materi gender pada saat proses pembelajaran secara spontan tanpa. Artinya dengan cara apapun materi-materi ataupun isu-isu gender tersampaikan ke mahasiswa dengan baik melalui kurikulum dan forum yang resmi sehingga pemahaman tentang gender terarahkan dengan baik, masuk akal, terarah dari berbagai tinjauan. Kurikulum berbasis gender yang dituangkan secara mandiri dalam kurikulum atau terintegrasi kedalam matakuliah yang ada pasti memberikan dampak yang berbeda. Adapun pengintegrasian berdampak pada penghematan dan pemadatan kurikulum, waktu, kontekstual dan factual, sedangkan pengembangan kurikulum secara terpisah akan memakan waktu yang lama karena merubah visi, misi dan tujuan pendidikan, standar, kompetensi dan lain sebagainya.

Dalam pendidikan melakukan pengembangan kurikulum bersama pusat studi pengkajian kurikulum, seperti pengembangan kurikulum berbasis gender baik di perguruan tinggi berbasis keagamaan khususnya dan pada lembaga pendidikan lain mulia tingkat menengah pertama sampai perguruan tinggi merupakan hal yang positif dan inovatif bagi keadilan gender dan kesetaraan gender dalam kehidupan di zaman yang semakin berkembang ini, menuju *gender equality and equity*.⁷⁵ Pengajar atau Dosen dapat mengajarkan isu-isu

⁷³ 'Syahrul A'dam, "Isu-isu Gender dalam Mata Kuliah Tasawuf", dalam Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender, hal. 94.

⁷⁴ 'Membangun Kurikulum Berbasis Gender: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 02/08/2008, (<http://www.sunanampel.ac.id/berita/detail.php?id=98.Susilaningsih> dan Agus M (ed), Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam (Yogyakarta: UIN Sunan KaliJaga dan McGill IISEP, 2004) h. 31-33

⁷⁵ Dian Nurvita Sari, Leila Mona Ganiem. *Semiotic Analysis of Gender Equality Representation in Soy Sauce Product Advertising* <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak/article/view/4298>

gender dengan dua macam cara, yakni bersifat *overt curriculum*⁷⁶ bersifat terbuka, semua unsur tertera, mulai dari deskripsi tujuan pembelajaran, materi pokok perkuliahan, referensi, strategi pembelajaran dan tata cara evaluasi terlihat dengan jelas. Dan bersifat *hidden curriculum*,⁷⁷ hanya memuat sebatas kurikulum dan yang disampaikan oleh pengajar atau Dosen saat pembelajaran, strategi pembelajaran dan media yang dipakai termasuk bahasa komunikasi yang digunakan saja.

Sesungguhnya dan seharusnya kurikulum itu tidak hanya mendeskripsikan konsep dan mencerminkan sikap serta pandangan di saat pertemuan dalam ruang pembelajaran akan tetapi juga menggambarkan kondisi masyarakat dan bahkan negara mengenai isu-isu tertentu, termasuk isu gender. Nur Hamim berpendapat bahwa kurikulum yang dibangun tidak berbasis gender dilatarbelakangi adanya disparitas fungsi antara sifat *hidden curriculum* dengan aktivitas yang dilakukan oleh pendidik dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan mata kuliah yang diajarkan oleh dosen dan atau guru tidak sesuai dengan keilmuannya, sehingga berakibat pada para dosen dan guru tidak memahami dengan baik dan benar serta mendalam muatan tersirat yang terkandung dalam kurikulum. Keadaan demikian ini mempengaruhi sikap dan perilaku saat pembelajaran dan bahkan perilaku sehari-hari. Untuk itu di anjurkan agar kurikulum harus berbasis gender atau sensitive gender yang *expilisit/overt curriculum* agar permasalahan gender bisa tersampaikan dengan jelas dan benar. Kurikulum berbasis gender penting ada dan diterapkan dalam proses belajar mengajar pembelajaran karena mengandung tujuan yang sangat mulia yakni selain mencerdaskan kehidupan bangsa, Negara dan agama juga membentuk laki-laki maupun perempuan yang bermartabat, berakhlak mulia berwawasan luas, sehingga kedua jenis manusia ini dapat saling menghargai, saling bekerjasama dan terbentuk rasa kesalingan dalam hal yang baik demi kemajuan dan perkembangan bersama.

Untuk mencapai tujuan terbentuknya keluasaan pemahaman kegenderan dengan baik yang diterapkan dalam kurikulum diperlukan:

1. Kesiapan tenaga pendidik yang berwawasan gender

Tenaga pendidik harus terlebih dahulu mengasah kemampuan tentang gender melalui bacaan, seminar, pelatihan sensitivitas gender dan bentuk kegiatan sejenis, agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berperspektif gender sesuai rumpun ilmunya dan mata kuliah yang diampunya. Dengan mengikuti berbagai kegiatan yang bersifat sensitivitas gender para tenaga pendidik mampu mengidentifikasi permasalahan

⁷⁶ <http://repository.uinsu.ac.id/4650/4/BAB%20II.pdf> di akses 19 Maret 2022 jam 10 dan 1Sholeh Hidayat, (2013), Pengembangan Kurikulum Baru, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 19

⁷⁷Rustan Efendy. <https://media.neliti.com/media/publications/285734-kesetaraan-gender-dalam-pendidikan-b62e742e.pdf>

ketidakadilan gender pada materi kuliahnya. Di samping itu, wawasan gender yang dimiliki para pendidik merupakan kerangka dasar dalam membuat silabi mata kuliah dan proses pembelajaran yang responsif gender.⁷⁸

2. Memperlakukan setiap peserta didik dengan adil.

Maksudnya memberikan tugas dan kesempatan yang sama pada peserta didik baik laki-laki maupun perempuan berkembang. *Affirmative*⁷⁹ sangat penting dilaksanakan jika belum optimal dalam menggunakan kesempatan pembelajaran. Perlakuan yang adil oleh tenaga pendidik saat proses pembelajaran merupakan cerminan dalam mempraktikkan kesetaraan gender. Semua pihak tidak melakukan pelecehan dengan bentuk dan model apapun kepada pihak lain. Misalnya, komunikasi, verbal, psikologi dan lain sebagainya langsung maupun tidak langsung.

3. Tidak mengajari atau menggurui.

Dalam proses pembelajaran seorang pendidik seharusnya mendialogkan antara pendidik dengan peserta didik atau mahasiswa tentang apa yang difahami dan pakta tentang gender. Sehingga semua aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, semua akan mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari pengalaman itu, yang pada gilirannya hasil belajar merupakan bagian dari diri, perasaan, dan tentu saja semua terdorong untuk lebih kreatif.

4. Terbuka

Secara akademik, tidak ada tindakan menyembunyikan referensi yang berperspektif gender. Jika dalam materi tertentu tidak ada buku rujukan yang berperspektif gender, maka pendidik harus memberi muatan gender tersendiri.

5. Melalui pendekatan secara holistik

Kurikulum berbasis gender pada materi ajar keagamaan yang mengandung pesan moral khusus untuk menggunakan pendekatan yang holistik⁸⁰ ketika membangun pemahaman atas materi tersebut. Dengan demikian semua pihak akan menjadi orang yang terbuka dan tidak berwawasan picik. Jika peserta didik merupakan subjek yang unik, melalui stimulus untuk mengembangkan kemampuan pengenalan, kreatifitas nalar, perasaan, penghayatan, kemauan, dan kecakapan agar mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran dengan teknik-teknik bervariasi.

6. Dialog

Porses pembelajaran yang berazas kesetaraan gender, bukan berarti proses pengajaran bersifat satu arah, namun proses komunikasi pembelajaran mengenai pengalaman, diskusi, menelaah wacana, memberi komentar kasus, menerapkan hukum dan sebagainya. Visualisasi yang didiskusikan memerlukan media, seperti wacana, hand out, gambar, film, kertas dan alat tulis lainnya. Media-media ini memungkinkan terjadinya dialog semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Pendekatan

⁷⁸Wayan Sudarta <https://ojs.unud.ac.id/index.php/srikandi/article/view/2758>

⁷⁹ Hendri Sayuti <https://media.neliti.com/media/publications/220357-hakikat-affirmative-action-dalam-hukum-i.pdf>

⁸⁰Siti Irene Astuti Pendekatan Holistik dan Kontekstual Dalam Mengatasi Krisis Kaarakter di Indonesia <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/234>

kurikulum gender multikultural perlu melibatkan Depdiknas sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Sebab memerlukan standarisasi kurikulum, dan sillabus berwawasan gender. Selain itu, terciptanya kesetaraan gender dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang peka gender.⁸¹

Menanamkan kesadaran gender melalui pendidikan multikultural dapat membentuk manusia yang mampu menjunjung tinggi demokrasi, penegakkan keadilan, menghapuskan deskriminasi, penjaminan penegakkan hak dasar kemanusiaan, nilai keagamaan, multikultural dan keberagaman bangsa Indonesia. Multikultural tidak membuahkan hasil yang substantif jika partisipasi laki-laki dan perempuan sejak dini tidak sejalan dengan setara. Kesetaraan dan keadilan gender harus diakomodir oleh perguruan tinggi karena selain sudah menjadi isu yang sangat penting dan juga sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, oleh karena itu seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut.

Dalam dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi untuk menjadi kampus yang responsive gender, perlu adanya kurikulum yang responsiv gender. Penerapan kurikulum berbasis gender itu perlu adanya pedoman yang berisikan langkah-langkah penyusunan kurikulum yang mengakomodir kurikulum berbasis gender dan silabus beberapa matakuliah berisikan kajian gender atau responsive gender, jelas dapat dimengerti bahwa *out put* dari pedoman kurikulum dan silabusnya menuju ramah perempuan. Sehingga kampusnya atau perguruan tingginya berkarakteristik ramah perempuan. Perguruan tinggi keagamaan Islam menurut Kemen PPPA sangat presentatif menjalankan pengintegrasian gender dari sudut pandang tata kelolah berdasarkan peraturan perundang undangan No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Indonesia adalah salah satu pesertanya, mempunyai kewajiban melakukan sebuah tindakan tepat dengan mengeluarkan kebijakan tentang menghapus diskriminasi terhadap perempuan⁸² dalam berbagai lini kehidupan baik di ranah perpolitikan, publik, pendidikan dan bahkan sampai ke kampus-kampus dengan kurikulum dan silabusnya yang berbasis gender, yang mana kesetaraan perempuan dan laki-laki terkaji dengan baik di forum akademik.

⁸¹Djoko Siswanto Muhartono [file:///C:/Users/acer/Downloads/175-Article%20Text-329-1-10-20210205%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/175-Article%20Text-329-1-10-20210205%20(1).pdf) . JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri

⁸²Rini Maryam <file:///C:/Users/acer/Downloads/379-1037-1-SM.pdf>. MENERJEMAHKAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) KE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hak-hak atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terjamin. Sehingga tidak terjadi lagi perilaku diskriminasi, yang ada adalah jaminan terhadap perempuan dalam bidang kesempatan kerja, dalam bidang pelayanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana, dan dalam bidang ekonomi, kehidupan sosial, serta di bidang hukum. Seperti pemerintah memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan sampai ke desa-desa dalam mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi keluarganya, yang mana sektor ekonomi yang tidak hanya dinilai dengan uang saja. Perempuan dapat ikut serta dalam dan mendapat manfaat dari pembangunan pedesaan, hukum

Dengan demikian perempuan cakap dalam semua urusan sipil, dan juga berkecakapan dalam bidang hukum sebagaimana laki-laki dan mempunyai kesempatan yang sama berkarir dalam kecakapan tersebut. Diberikan hak-hak hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan memilih tempat tinggal dan domisilinya. Serta mempunyai jaminan dalam menjalankan urusan perkawinan dan hubungan keluarga yang sama dengan laki-laki.

F. Latar Belakang Bergaungnya Kampus Ramah Perempuan

Kejadian yang banyak terjadi di lingkungan kampus yang dilakukan oleh civitas akademika dan insana kampus, mahasiswa, dosen, tenaga-tenaga fungsional kampus serta orang-orang yang ada di dalam kampus seperti satpam, pengelola dan karyawan kantin dan lain sebagainya. Diantara kejadian tersebut adalah unggahan foto seorang mahasiswi baru di akun Amerta pada tahun 2019 walau yang secara akal dan nalar tentu tidak ada terseriat niatan mengundang bentuk yang dikenal dengan istilah “pemeriksaan” secara online dari para pengikut akun tersebut. Foto yang diunggah yang mengenakan pakaian tertutup dengan pose yang sedemikian formal mengundang komentar seksis dari segenap netizen yang melihatnya.

Jika menyangkut penampilan perempuan dengan menggunakan apapun jenis pakaian yang dikenakan, tetap mendapatkan cibiran dan komentar negative dari pengguna internet, pandangan dengan diaplikasikan melalui komentar negative atau seksis tersebut dikenal dengan istilah “pemeriksaan daring”. Kejadian terjadi pada saat Badan Eksekutif Mahasiswa salah satu universitas ternama di Indonesia. Sehingga ada salah satu warganet berani meminta admin untuk memberikan identitas akun dari mahasiswi yang bersangkutan. walaupun *moto excellence with morality*-terpampang jelas dan sangat

cukup digaungkan, apa yang terjadi ini sungguh miris bila melihat apa yang dilakukan oleh admin akun resmi Amerta 2019 yang ikut ikutan mencari informasi akun sang mahasiswi tersebut.

Dirasakan miris karena Universitas Airlangga pada saat kejadian ini yakni 27 Februari 2019 mendeklarasikan sebagai kampus ramah perempuan di Aula Soetandyo Fisip Unair, yang mana semua pihak terkait, termasuk civitas akademika dari UNAIR harus benar-benar saling bersinergi dalam mewujudkan kampus yang betul-betul ramah dengan perempuan. Sedangkan apa yang dilakukan oleh admin Amerta 2019 melenceng dari kata ramah terhadap perempuan, bahkan hampir dapat mencederai mahasiswi baru tersebut. Dan bisa dibayangkan apa yang terjadi jika seandainya akun media social mahasiswi seperti fb atau lainnya di ketemukan, dapat dipastikan para laki-laki akan berfantasi bahkan lebih jauh lagi. Semua instansi khususnya instansi yang menaungi generasi penerus bangsa seperti instansi pendidikan apalagi yang sudah beridentitas *excellence with morality* haruslah ramah terhadap perempuan, bertanggungjawab secara moral memperlakukan perempuan dengan baik dan tetap menjunjung tinggi harga diri perempuan. *World class university*⁸³ seharusnya juga di giatkan dalam rangka membenahi dan membangun sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Kegiatan sesi *talkshow* yang bertajuk *Women Empowerment at Campus*⁸⁴ yang dilaksanakan oleh Komunitas Universitas Indonesia Kampus Ramah Perempuan UI KRP kegiatan ini merupakan wadah untuk membicarakan isu-isu kesetaraan gender di lingkungan kampus, diskusi, sharing dan berbagi cerita bagaimana untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kampus. Diskusi ini diawali dengan penayangan video singkat mengenai isu eksistensi perempuan di lingkungan kampus sebagai ruang publik. Diharapkan para peserta mengingat pada kasus ketidakadilan gender yang melibatkan nama organisasi pada sebuah universitas di Jakarta. Isi video ditunjukkan isi akun Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas sebuah universitas dimana foto anggota Badan Pengurus Harian (BPH) perempuan sengaja disensor dengan cara diturunkan opacity-nya. Dengan dalih ‘menjaga kehormatan perempuan’, sedangkan foto laki-laki dibiarkan tetap terlihat jelas. Dan juga foto anggota perempuannya diubah menjadi anime perempuan muslimah.

⁸³ <http://diktis.kemenag.go.id/v1/artikel/world-class-university-obsesi-atau-mimpi> Mastuki HS (Kasubdit Kelembagaan Diktis) *World class university* (Menuju Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Kelas Dunia)

⁸⁴ <https://suaramahasiswa.com/sudahkah-kampus-menciptakan-lingkungan-yang-setara-bagi-perempuan>
Redaksi Suara Mahasiswa · 31 Maret 2021

Unggahan seperti ini mendapat berbagai kecaman dari publik. Namun, pihak dari organisasi terkait berkilah bahwa sudah ada kesepakatan bersama sebelum foto-foto tersebut diunggah. Fenomena ini menyiratkan bahwa eksistensi perempuan di ruang publik, seperti lingkungan kampus, masih sangat dibatasi. Bentuk pengekangan ekspresi perempuan di ruang publik saja di lingkungan kampus, perempuan masih saja harus menanggung pedihnya berbagai ketidakadilan. Menurut Aprilia Resdini salah satu Koordinator SPACE UNJ, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, seperti *marginalisasi*, subordinasi, stereotip,⁸⁵ kekerasan, dan beban ganda. Tindakan marginalisasi dan subordinasi pada mahasiswa terjadi ketika mahasiswa atau dosen memilih laki-laki sebagai ketua, baik ketua kelas maupun ketua organisasi. Tindakan tersebut jelas bahwa kampus masih sangat kurang berperan dalam mengadvokasi isu kesetaraan gender,. Kampus sebagai institusi pendidikan, harus mampu menciptakan ruang aman yang inklusif dan kondusif, bebas dari kekerasan, diskriminasi. Kampus seharusnya memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki, tidak hanya dalam hal pendidikan, tetapi juga keorganisasian. Kampus seharusnya dapat mengedukasi civitas dan masyarakatnya mengenai hal ini.

Kesetaraan gender adalah situasi setara bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak yang sama di berbagai bidang, baik politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan sebagainya.⁸⁶ Sayangnya, pola pikir mengenai inferioritas perempuan, budaya patriarki dan konservatisme yang masih kental di Indonesia juga menghambat tercapainya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Perempuan sering dianggap lebih rendah dari pada laki-laki dalam ranah publik dan juga ranah akademik,. Di ranah akademik terjadi kepada dosen, seperti Dosen perempuan masih harus *struggling* bertahan di antara para dosen laki-laki. Lucunya, setiap kali ada isu yang terkait dengan sensitivitas, seni, konseling kepada mahasiswa selalu diberikan

⁸⁵ **Stereotip:** Pemberitan sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya (ras, suku, jenis kelamin, kebangsaan). Contoh: Laki-laki atau perempuan yang bertato memiliki stereotip negatif sebagai penjahat atau orang yang nakal. **Subordinasi,** Pembedaan atau : penomor duaan perlakuan terhadap identitas tertentu. Dalam hal ini kelompok mayoritas yang dominan akan menguasai sumber daya yang ada sehingga kelompok minoritas diperlakukan tidak seimbang. Contoh: Laki-laki dianggap lebih kompeten memegang jabatan manager dibanding perempuan. **Marginalisasi:** Proses peminggiran kelompok tertentu dari lembaga sosial utama karena ada kelompok yang dominan meminggirkan kelompok yang lemah dari pelayanan, program , maupun kebijakan. Contoh: masyarakat menengah ke bawah sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. **Dominasi:** Suatu kondisi ketika suatu kelompok bergantung pada hubungan sosial yang wewenang dan kekuasaanya dikendalikan oleh kelompok lain. Contoh: perbudakan.

⁸⁶ Ikhaputri Widiyanti, M.Si, dosen Filsafat Universitas Indonesia,

kepada Dosen perempuan. Sedangkan jika isu prestige seperti politik negara dan problem logika, pasti dosen laki-laki yang muncul.

Dari perspektif feminisme sosialis, keluarga adalah institusi peran gender pertama, sebagaimana dialami oleh Athalla Hardian.⁸⁷ Dia membagikan pengalamannya mengenai ketidaksetaraan gender secara langsung dan tidak langsung dalam *talkshow* ini. Sebagai anak bungsu perempuan Athalla selalu didampingi oleh orang tuanya kemanapun ia pergi hingga ia berusia 18 tahun. Athalla merasa ruang geraknya sangat dibatasi, dan ia akhirnya menyadari bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya terutama bagi perempuan saat ia masih harus didampingi. Untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri, Athalla mengikuti berbagai kepanitiaan selama masa kuliahnya. Pada tahun 2018, Athalla mengikuti perlombaan Abang Nene Jakarta, dimana ia berhasil meraih titel Nene Jakarta Selatan dan maju ke tingkat provinsi DKI Jakarta.

Dimana dia mengalami indikasi pelecehan saat latihan menari melalui teguran dengan kalimat dasar perempuan bodoh. Memang susah upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender, harus menyadari privilege diri serta mengedukasi diri agar kedepannya bisa berpartisipasi aktif dalam aktivisme kesetaraan gender. Aktivisme ini juga penting untuk laki-laki, karena laki-laki bisa menjadi sekutu maupun supporter gerakan ini. Aprilia menekankan bahwa jangan sampai laki-laki menjadi *speaker*, karena jika itu terjadi, maka ruang perempuan yang seharusnya untuk perempuan digantikan laki-laki. Akan tetapi, -walaupun disisi lain ada yang menyanggah bahwa laki-laki tidak bisa menjadi speaker, karena dalam feminisme gelombang ketiga dapat ditemukan juga laki-laki yang menjadi korban isu kesetaraan gender akibat *patriarki*.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)⁸⁸ saat mengadakan acara dialog tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi menghasilkan gerakan yang merupakan sebuah aksi yang bertujuan untuk *melaunching* sebuah gagasan dan gerakan, yakni "Kampus Ramah Perempuan". Wacana seperti ini memang bukanlah hal baru, sebab setahun sebelumnya juga pernah ada kegiatan yang sama yakni pada saat menyambut *Internasional Women's Day*, dimana Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendukung Kebijakan *Three Ends* yang dipelopori

⁸⁷ Saat mengikuti ajang pemilihan Nene Jakarta tahun 2018, dan dia juga sebagai mahasiswa Psikologi Universitas Indonesia angkatan 2017

⁸⁸ (www.beritabanjarmasin.com, 13/7/19). Diakses hari sabtu tgl 12 Maret 2022, **Selviana Aidani (Aktivis Dakwah Kampus, Member Akademi Menulis Kreatif)** bertempat di Mongopi Jalan Pulau Laut Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (12/7/2019). Saat dialog publik Bertema "Kekerasan Seksual di Ranah Perguruan Tinggi yang pesertanya adalah anggota PMII, IMM, KAMMI dan GMNI

oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁸⁹ Ada tiga hal yang menjadi titik fokus dalam Kebijakan *Three Ends* yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Selanjutnya. Adapun program lanjutannya⁹⁰ adalah membantu permasalahan perempuan di lembaga pendidikan khususnya di kampus, yakni Program "Kampus Ramah Perempuan" (KRP) untuk membantu Kementerian PPA menyelesaikan permasalahan perempuan khususnya di tataran kampus.

Banyak kampus-kampus yang dalam kondisi belum berpihak pada kebutuhan dan kepentingan perempuan. Seperti terjadinya fenomena marginalisasi dan diskriminasi serta pemiskinan perempuan. Fenomena marginalisasi dan diskriminasi serta pemiskinan perempuan ini tentu menyalahi prinsip yang terdapat dalam Tri Dharma PT itu sendiri.. Oleh karenanya Program Kampus Ramah Perempuan yang mengintegrasikan perspektif pro gender equality dalam management kampus harus dihadirkan. Ditandai dengan pembenahan kurikulum (content), struktur (organisasi) hingga budaya yang ramah perempuan. Keberadaan program KRP diharapkan mampu meminimalisir bahkan menghapus sistem *patriarki* di kampus.

Walau gagasan Kampus Ramah Perempuan terindikasi adanya ide-ide feminisme yang seakan-akan kaum feminis merong-rong pengarusutamaan opini gender di berbagai lini, termasuk kampus dan dimuluskan dengan perantaraan organisasi keislaman. Di harapkan seluruh pengaturan kampus berbasis gender dengan memasukkan ide kesetaraan gender ke kampus. Tuntutan kesetaraan gender terhadap perempuan secara menyeluruh, tentunya yang tidak rusak peran perempuan sebagai *ummu wa rabbatul bayt* dan *ummu ayyal* (ibu generasi). Feminisme seperti ini dapat mengantarkan perempuan pada kesuksesan hakiki agar kriminalitas yang menimpa perempuan berkurang dan bahkan akan sedikit demi sedikit terhapuskan baik dalam rumah ataupun di luar rumah. Perempuan jangan harus ikhlas dan happy dalam mengemban dua tugas di waktu bersamaan yakni bekerja dan mengurus keluarga karena kemungkinan jika perempuan yang lebih banyak di luar rumah untuk bekerja, menyebabkan keluarga dan urusan rumah tangga terbengkalai yang dapat menyebabkan perceraian dan masa depan kepada anak.

⁸⁹ Sindonews.com (8/3/2018)

⁹⁰ Sindonews.com (8/3/2018) "Menurut ketua bidang pergerakan sarinah dan perlindungan anak DPP GMNI, Dia Puspitasari,

Ide kesetaraan gender yang digaungkan oleh Barat yang lepas dari nilai keislaman ke kaum muslim dapat berakibat buruk bagi keadilan perempuan itu sendiri, untuk itu harus dipahami bersama fungsi dan peran perempuan dalam Islam yang sebenarnya. Adalah *Ummu wa rabbatul bayt* dan *ummu ayjal*,⁹¹ tugas mulia sebagai pendidik anak-anak untuk menjadikan generasi emas pengokoh peradaban Islam selanjutnya. Islam mengatur tugas dan peran masing-masing, kesejajaran sudah jadi ketetapan dalam Islam antara pria dan perempuan, yakni sama-sama menjadi makhluk ciptaan Allah yang harus taat atas segala peraturannya. Maka jalankanlah dengan apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya. Jika perintah Allah dijalankan sesuai dengan peran dan fungsinya dengan benar maka itulah kesetaraan gender dan keadilan gender. Secara tersirat pemahaman ini diambil dari firman Allah swt dalam al Qur'an⁹²

أَفَحُكْمَ الْجَهْلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٥١﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,

⁹¹ <https://www.islampos.com/asyiknya-menjadi-ummun-wa-rabbatul-bait-109402/> Minah, Catatan Hati Muslimah Perindu Surga

⁹² QS. Al-Maidah: 50. An-Nisa': 34: Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Mencari-cari kesalahan : untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Benar memang bahwa adil tak mesti sama., namun bukan berarti bahwa hanya laki-laki yang diwajibkan mencari nafkah serta pemimpin keluarga, sedangkan perempuan hanya wajib mengurus keluarga dan menjadi ibu rumah tangga. Untuk membatasi pemahaman feminisme Barat secara liar masuk dalam keluarga, dan kampus-kampus. Perlu ada dihadapkannya gender atau keadilan dalam pandangan Islam. Keluarga berfungsi sebagai pengontrol dibidang sosial, politis dan strategis lainnya. Maksud berfungsi sebagai pengontrol di lini politis dan strategis adalah untuk menyiapkan generasi emas bangsa dan agama yang bertaqwa, cerdas, tangguh, dan sebagai pemimpin peradaban yang mampu membawa Islam predikat paling tinggi dan terbaik.

Oleh karenan itu untuk mewujudkannya dengan cara menjalankan dan memahami Islam secara *kaffah*,⁹³ baik dan sempurna. Salah satu institusi negara yang dapat menyampaikan pesan rengkuhan Islam dalam pembagian peran dan fungsi dalam keluarga dapat berjalan secara proporsional untuk meraih ridha Allah *Ta'ala* adalah perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri khususnya.. Selain itu, penerapan Islam secara menyeluruh ini juga untuk melindungi unit keluarga dari kebrutalan konsep keadilan gender yang berkembang.

Naungan Islamlah melalui perguruan tinggi keagamaan Islam negeri diharapkan dapat memuliakan perempuan pada yang seharusnya, jalur pendidikan yang dipilih dalam menjalankan Islam secara seutuhnya karena bahwasanya yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik dan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sebagaimana terlihat dalam al qur'an⁹⁴

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

⁹³https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/Islam_realitas/article/view/183

A. Rahman Ritong Memahami Islam Secara kaffah: Integritas Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu_Ilmum Umum

⁹⁴ QS An-Nahl: 97: Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Dan Al-Hujurat: 13:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ide Kampus Ramah Perempuan akan dirancang modulnya oleh 15 orang dari berbagai kampus di Indonesia, peneliti dari LIPI, Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan beberapa aktivis perempuan. Dengan tujuan menimalisir kekerasan perempuan di institusi pendidikan, yaitu kampus. Hal ini karena, mahasiswa saat kuliah mengalami kekerasan baik fisik maupun non fisik.. sebagai proses penyadaran bahwa sistem pendidikan nasional juga harus bermuatan persektif gender. Peran para Akademisi dan Lembaga Riset dalam pengarusutamaan gender sangat diperlukan agar seluruh sivitas Perguruan Tinggi dapat menjadi perpanjangan tangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam menjangkau masyarakat luas, terutama mahasiswa sebagai agen perubahan serta penerapan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemen kampus yang responsif gender oleh jajaran pimpinan Perguruan Tinggi. Bila kesetaraan gender dapat diwujudkan di Perguruan Tinggi, kesempatan perempuan sebagai pembuat keputusan dan menempati posisi strategis di kampus semakin meningkat dan terhapusnya kekerasan dalam kampus secara tuntas. “Isu gender di kampus sangat banyak mulai dari pelecehan hingga kekerasan seksual, untuk itu seluruh elemen kampus sangat dibutuhkan dan peran untuk menuntaskannya secara maksimal dan serius, termasuk laki-laki agar lebih responsif terhadap isu-isu gender. Tidak menutup kemungkinan pembangunan manusia, dan pemberdayaan gender pembangunan gender di Indonesia meningkat signifikan dari sebelumnya. bisa merata peningkatannya,”⁹⁵ untuk mengikat Perguruan Tinggi dalam

⁹⁵ Demikian ungkap Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni dalam Workshop Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Perguruan Tinggi untuk Penerapan Perguruan Tinggi yang Responsif Gender yang diselenggarakan pada 4 – 6 Desember 2019 di Depok

responsif gender tertera dalam, Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 6 poin (b) berbunyi bahwa:

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Salah satu cara memulai untuk menuju itu adalah membuat kebijakan menyusun kurikulum berbasis gender yang diberikan kepada mahasiswa diberbagai kegiatan, termasuk pembelajaran, kuliah umum, persiapan magang, persiapan KKN dan lain sebagainya. isu kesenjangan gender di Perguruan Tinggi bahkan berbagi kisahya sendiri. “Kesetaraan gender bukan berarti memberikan suatu hak spesial dan dispensasi khusus hanya untuk perempuan, melainkan memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama baik perempuan maupun laki-laki.”⁹⁶ Dengan demikian Perguruan Tinggi yang Responsif Gender dapat terwujud dengan nyata sehingga kesenjangan gender bisa terhapuskan dan kesetaraan gender bisa terwujud secara maksimal. Mengingat Jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa, sekitar 49,5%-nya adalah perempuan,⁹⁷ maka mereka akan menjadi modal besar dalam pencapaian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, dapat memperkecil kesenjangan gender, serta meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. perempuan dapat berwirausaha, andil di struktur desa maupun Badan Permusyawaratan meningkatnya partisipasi perempuan dan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, melindungi perempuan dan meningkatkan akses dalam ranah publik sangat diperlukan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Penelitian yang berjudul strategi penerapan kurikulum Responsif gender pada PTKIN di Indonesia menuju kampus ramah perempuan, strategi pengambilan datanya melalui wawancara langsung dan tidak langsung, pengamatan serta dokumentasi. Yang dimaksud dengan wawancara langsung adalah peneliti mengunjungi lokasi perguruan tinggi dan juga Pennggiat perempuan ataupun gender. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan melalui google form yang peneliti kirim ke individu dosen, dan ketua Pusat Studi Gender dan Anak untuk mengisi dan menjawab pertanyaan peneliti

⁹⁶ Ungkap Lies Endarwati. salah satu sivitas akademisi Universitas Negeri Yogyakarta, Beberapa Perguruan Tinggi di Sumatera seperti Universitas Jambi dan Universitas Bengkulu

⁹⁷ Musdah Mulia, Perlindungan Hak-hak Perempuan pada Era Digital, Mataram 19-10 2021 dalam acara seminar

Adapun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang peneliti kunjungi adalah Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Aceh, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Ketiga universitas Islam Negeri yang sangat aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan Responsif dan ataupun berbasis gender menuju kampus ramah perempuan dan anak. Peneliti juga melakukan pengamatan serta wawancara di kampus UINFAS Bengkulu sebagai tuan rumah bagi dua orang peneliti. Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara langsung pada ketiga yakni pihak-pihak yang peduli terhadap kemajuan serta perkembangan gender baik di kampus maupun di masyarakat. Pihak-pihak yang peneliti maksud adalah, MUI, beberapa pengiat dan pemerhati perempuan, Alimat, Fatayat, Muslimat, Aisyia dan lain sebagainya, peneliti mengikut sertakan mereka ini untuk mendapatkan masukan tentang matakuliah atau kurikulum responsif dan berbasis gender yang tepat menurut mereka. Sedangkan data yang didapat melalui pengisian google form yang peneliti kirim ke berbagai perguruan tinggi Islam negeri dan sebanyak dua puluh dua perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang mengisi google form dari 32 PTKIN yang peneliti share linksnya.

Dari hasil wawancara, pengamatan dan isian links google form didapatkan data tentang penerapan kurikulum responsif gender di perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia, yang peneliti deskripsikan sesuai sub bab berikut ini.

A. Struktur Kurikulum Responsif Gender di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan baik melalui wawancara langsung maupun tidak langsung di berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia, bahwa struktur kurikulum responsive gender tidak seragam, sangat bervariasi, sebagian besar tidak mempunyai bentuk ataupun wujud sebagai Patamarga. Baik ditingkat institusi apalagi fakultas ataupun program studi.

Di Universitas Islam negeri Mataram sebagai Universitas Islam negeri yang baru, Rektornya sangat responsive gender yang beberapa fasilitas sudah memenuhi standar kampus responsif gender karena sudah memiliki PSGA, UINCare sebagai tempat penanganan korban kekerasan, ruang laktasi, ruang merokok dan lain sebagainya, bahkan sudah ada juga fasilitas untuk disabilitas, yang mana penerapan kurikulum berbasis gender ada di tingkat program studi dan itu pun tidak semua program studi ada. Hal ini dapat dilihat dalam struktur kurikulum berdasarkan pedoman akademik terbaru yakni tahun 2021. Berdasarkan SK Rektor UIN Mataram No 1740 tahun 2021 tentang pemberlakuan buku

pedomanan akademik tahun akademi 2021/2022. Salah satunya di program studi Sosiologi Agama di nomer 11 , sebagai tergambar dalam struktur kurikulum berikut;

1. SA-0140 Sosiologi Politik Islam
2. SA-0141 Patologi Sosial
3. SA-0158 Metodologi Penelitian Kualitatif
4. SA-0159 Metodologi Penelitian (Praktik)
5. SA-0160 Teori Sosial Modren
6. SA-0161 Sosilogi Pembangunan
7. SA-0162 Sosialogi Keluarga
8. SA-0163 Sosilogi Etnisitas
9. SA-164 Sosilogi Kriminlitas
10. SA-0165 Sosiologo Industri
- 11. SA-0166 Sosilogi Gender**
12. SA-0167 Ekonomi Pembangunan

Struktur kurikulum responsiv gender di UIN Mataram nampak hanya ada di beberapa program studi saja, ada di komponen program studi, bukan komponen fakultas dan bukan pula ditingkat Instiusi. Di Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh struktur kurikulum responsiv gender belum ada di dalam kurikulum Sedangkan di fakultas dan program studi lain serta di perguruan tinggi keagamaan lain pedoman kurikulum atau dalam kebijakan apapun, semuanya masih dalam wacana, konsep dosen-dosen yang mempunyai pemahaman dan atau responsiv gender, itu artinya struktur kurikulum responsiv gender ini belum ada wujudnya, belum ada dalam pedoman akademik ataupun kebijakan lainnya, begitupun pula di Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kegiatan yang responsif gender walau sudah diajarkan dan belum masuk kedalam struktur kurikulum secara resmi namun materi-materi pembelajaran yang responsiv gender kadang diajarkan pada saat perkuliahan berlangsung oleh dosen-dosen yang mempunyai kepedulian terhadap gender dan kadang dalam porum kelompok kelompok mahasiswa atau klinikel saja, seminar dan lain sebagainya. Adapun bentuk bentuk kurikulum yang diajarkan diluar struktur kurikulum resmi adalah; Hadis responsif gender, tafsir responsif gender, fiqh nisa, pengantar gender, Sosiologi Gender, Gender dan Pembangunan, Islam dan Kesetaraan Gender dan Gender dan inklusi sosial. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hampir semua perguruan tinggi keagamaan negeri di Indoesia dan bisa di katakan 99,99%nya belum menerapkan struktur kurikulum responsif gender secara sistematis, dan baik sebab tidak ditemukan dokumennya berupa struktur kurikulum itu sendiri kecuali yang baru disusun di UIN Mataram dan itupun baru nama-nama saja dokumen materinya belum ada seperti RPS dan Jurnal Perkuliahanya. Sepertinya di beberapa Universitas Negeri keagamaan sempat dan sering membahas masalah kegiatan-kegiatan dan bahkan

kurikulum ataupun materi responsif gender namun pelaksanaannya khusus kurikulum responsif gender sebatas wacana struktur kurikulum responsif gender namun belum ada realisasi yang pastinya dan mungkin kurang responnya pimpinan yang ada di tingkat rektorat.

Ada yang paling banyak adalah proses pembelajarannya menggunakan kurikulum terintegrasi gender, tidak merubah matakuliah tetapi hanya memasukan materi gender ke dalam materi perkuliahan, walau ini tidak banyak dosen yang dapat melakukannya sebab terkait pemahaman dan pengetahuan diri dosen yang bersangkutan

B. Strategi Penerapan Kurikulum Responsif Gender pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia

Anjuran penerapan kurikulum responsive gender di perguruan tinggi keagamaan negeri tergolong baru direspon secara positif dalam satu tahun ini, sementara perangkat akademik sudah terbentuk lama, maka otomatis setiap perguruan tinggi belum dapat menyesuaikan diri dalam menerapkan kurikulum yang responsive gender. Sehingga agak kelimpungan dan keteteran serta kebingungan menentukan nama, materi dan apalagi pengajarnya, Oleh karena itu perguruan tinggi- perguruan tinggi menggunakan atau memilih strategi sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu itu beberapa perguruan tinggi mensiasati anjuran penerapan kurikulum responsif gender dengan berbagai cara. Adapun data-data yang peneliti dapatkan melalui beberapa metode itu ditemukan bahwa strategi penerapan kurikulum responsif gender sangat beragam, sebagaimana data berikut:

Pertama: Ada empat perguruan tinggi yang menerapkan kurikulum responsif gender melalui *Social Action Approach*: Dengan mendiskusikan materi-materi tentang keadilan gender dari berbagai aspek, diskriminasi terhadap perempuan, mengapa itu terjadi, dan apa sikap yang harus diambil dalam menyikapi kenyataan ketidakadilan gender di masyarakat. seperti di acara yang rutin dilaksanakan di kampus: orientasi pengenalan kampus bagi mahasiswa baru, Pembekalan KKN, PPI dan lain sebagainya. Pada metode ini ternyata memberikan sedikit dampak pada mahasiswa sehingga mereka memiliki ketertarikan dengan isu2 gender. Yang menerapkan metode model ini ada empat (4) perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Model ini agak lebih mudah diterapkan karena tidak membutuhkan tenaga yang profesional betul namun cukup dosen-dosen atau kepala PSGA atau struktur pimpinan lain yang ada di lingkungan kampus masing-masing yang menyampaikannya, tidak berbiaya.

Ternyata metode ini belum banyak pula mendapatkan respon yang berlian dari pimpinan kampus, buktinya masih baru 4 perguruan tinggi yang menerapkan kurikulum responsif gender melalui *Social Action Approach*. Sehingga dampaknya belum Nampak sama sekali baik bagi mahasiswa maupun dosen or civitas akademika secara umum.

Kedua, Tujuh perguruan tinggi yang menerapkan kurikulum berbasis gender melalui metode *Transformational Approach*; Kurikulum dijadikan responsif gender dari berbagai aspeknya. Struktur mata kuliah yang mengakomodir isu gender. Seperti mata kuliah fiqh munakahat, pendapat ulama tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat dan lain lainnya. Namun metedo ini kurang berdampak, kurang mendapatkan perhatian dari mahasiswa atau yang lainnya. Metode *Transformational Approach* juga dipilih oleh beberapa perguruan tinggi dan lumayan diminati yakni ada tujuh (7) perguruan tinggi keagamaan negeri yang menerapkan ini.

Metode *Transformational Approach* memberikan dampak tidak banyak juga sebab dosen pengajar belum mampu menjabarkan dan mengembangkan materinya, karena tidak respek atau paham dengan gender dan keilmuan tentang gender, selalu timpang hanya berpaham patrilineal, nilai dan sisi posistif perempuannya masih belum luas. Stagnasi pemahman kea rah perempuannya masih kuat. Oleh sebab itu pengaruhnya juga terasa dan belum nampak, mahasiswa belum paham bagaimana menghargai satu sama lainnya atau dengan orang beda jenis kelamin, belum paham penempatan hak dan kewajiban secara baik, adanya pemahman yang kurang baik berakibat pada perlakuan diskriminasi sering terjadi dikalangan akademika.

Ketiga, ada sebelas perguruan tinggi menerapkan kurikulum responsif gender melalui metode *Additive Approach*: yakin dengan cara menambahkan materi-materi pada kurikulum yang ada tanpa mengubah bentuk kurikulum yang ada .(hanya menyelipkan isu isu gender saat proses pembelajaran, metode ini mendapatkan respon yang tinggi dari kalangan mahasiswa namun secara signifikan belum terasa dampangnya. Metode ini sebenarnya sulit diterapkan mengingat kemampuan dan kemauan dosen yang kurang mengenai gender dan tidak semua dosen melek tentang gender. Ini ujian terbesar bagi dosen untuk membaca, belajar lebih banyak dan panjang lagi.

Penerapan kurikulum berbasis gender model metode *Additive Approach* menurut mereka dampaknya lumayan ada, mahasiswa serta teman-teman sejawat mulai tertarik, bekeinginan tinggi, antusias berdiskusi materi gender, dan bahkan dalam forum diskusi kecil mahasiswa dalam perkuliahan sangat seru serta hidup, walaupun perubahan dalam berperilaku belum begitu berdampak secara signifikan.

Dan terakhir atau kelompok keempat ada tiga perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menerapkan metode *Contributions approach*; yakni penerapan kurikulum berplatform gender dengan sistem serta adanya kebijaksanaan lembaga pendidikan. Ada beberapa isu-isu gender secara jelas dimasukkan ke dalam kurikulum, dalam rangka merealisasikan kurikulum berbasis gender. Perguruan tinggi yang menerapkan method seperti ini berdasarkan data google form dan kunjungan peneliti diantaranya di Universitas Islam Negeri Mataram, IAIN Ponorogo, dan Sunan Kalijaga, dan Maulana Malik Ibrahim sedangkan Universitas Syarif Hidayatullah masih menerapkan dengan sistem menyelipkan materi materi gender ke dalam berbagai matakuliah yang kebetulan dosennya mempunyai pemahaman gender dan antusias dengan perkembangan gender. Penerapan kurikulum responsive gender dengan sistem atau model ini sangat berdampak pada kehidupan mahasiswa, mahasiswa sangat antusias, serius mengikuti pembelajaran mata kuliah, karena menurut mereka banyak pengetahuan baru yang dipahami.

Dan menurut para dosen, dan tenaga kependidikan method ini sangat tepat diterapkan sebab sangat besar kemungkinan memberikan dampak terhadap perubahan perilaku generasi bangsa yang melekat gender, saling menghargai dan kesalingan lainnya, metode ini sangat signifikan dan tepat diterapkan sehingga kampus ramah perempuan dapat dicapai, walaupun ditahun 2022 ini belum dapat dirasakan dampaknya mengingat kurikulum baru diterapkan semester dua ditahun akademik 2022 ini.

Secara umum penerapan kurikulum responsive gender yang diterapkan diberbagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yakni:

1. Kurikulum; materi gender dimasukan dalam pembelajaran melalui mata kuliah yang ada saja
2. Dalam struktur kurikulum responsif gender memasukkan isu-isu gender dan anak dalam pembahasan **perkuliahan**
3. Materi, metode, dan bahan ajar sebisa mungkin dikaitkan dg isu2 kesetaraan gender
4. Secara spesial tidak ada dalam struktur kurikulum
5. Menerapkan MBKM
6. Baru hanya sekilas penjelasan dari personal dosen
7. Terintegrasi dalam matakuliah
8. Isu Gender dimasukkan dalam salah satu materi dalam silabus
9. TerIntegrasi dengan Rencana Program Semester
10. Masih belum maksimal, mesti ada mata kuliah khusus
11. Untuk saat ini isu pengarusutamaan gender dalam kurikulum belum menjadi isu kolektif. Hal ini berdampak pada struktur kurikulum belum sepenuhnya responsif gender.
12. Isu-isu gender dimasukkan dlm aktifitas sosial yg ada di kampus
13. Masih dalam bentuk additive approach
14. Masih tahap sosialisasi
15. Disangsikan jika kegiatannya dilakukan online

16. Beberapa mahasiswa dan dosen yang merasakan dampaknya sehingga sedikit demi sedikit merubah dan mengurangi perbuatan yang mengarah ke tindakan tidak menghargai yang lain
17. Mahasiswa sangat paham dan aplikatif tentang bagaimana berinteraksi dengan gender dan menghormatinya
18. Penghormatan pada perempuan, tahu sejarah perempuan dan kontribusi perempuan di segala level
19. Betul ada perempuan terlihat ada kepedean
20. Pada sebagian kurikulum MK yang memasukkan responsif gender nampak bahwa terjadi perubahan sikap atau perilaku. Paling tidak mahasiswa sudah terpapar dengan isu gender.
21. Butuh kepedulian Perempuan baik dari kalangan dosen maupun tendik lainnya

Sedangkan menurut para ahli pendidikan, agama, psikologi, penggiat gender dan beberapa keilmuan lain yang peneliti wawancarai model kurikulum responsive gender yang bisa diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Mereka menyatakan bahwa kurikulum responsiv gender di perguruan tinggi keagamaan sangat penting keberadaan, adapun nama-nama mata kuliah yang bisa menjadi alternatif masuk ke dalam di perguruan tinggi keagamaan negeri adalah :

Kurikulum responsif gender

1. Hadis responsif gender (jumarim dkk)
2. tafsir responsif gender
3. fiqh nisa
4. pengantar gender
5. Sosiologi Gender
6. Gender Dan Pembangunan
7. Islam dan Kesetaraan Gender
8. Gender dan inklusi sosial
9. Komunikasi gender
10. Kajian Media gender
11. Sosiologi komunikasi antar gender
12. Studi gender dalam Islam
13. Pendidikan gender

Sedangkan kurikulum yang berbasis gender

1. Bhs Indonesia
2. Metodologi Studi Islam/Studi Islam
3. Ilmu Dakwah
4. Hadis
5. Tafsir
6. Sosiologi
7. Antropologi
8. Psikologi
9. Ushul fiqh
10. Fiqh

11. Hukum Keluarga
12. Ilmu komunikasi
13. Media massa
14. Sosiologi komunikasi
15. Ilmu Hukum
16. Ilmu pendidikan

Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia dalam merialisasikan tuntutan penerapan kurikulum responsif gender dalam rangka memenuhi salah satu sarat kampus yang responsif gender dan mendukung terciptanya kampus yang nyaman dan aman bagi perempuan atau yang sering disebut dengan kampus ramah perempuan berdasarkan data baik yang diperoleh dari wawancara langsung, pengamatan dan isian google form strategi yang digunakan bervariasi dan mayoritas menerapkan metode *Additive Approach*, dengan alasan lebih mudah dan praktis walau seperti masih ilegal di instansi masing-masing dan hanya dilakukan oleh dosen-dosen yang terbatas.

Banyak kalangan dari pemerhati, penggiat, peduli perempuan dan khususnya kalangan perempuan itu sendiri mendesak agar perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi keagamaan negeri diusahakan menjadi kampus ramah perempuan sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana tercantum dalam buku panduan perguruan tinggi responsif gender yang diterbitkan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia. Di dalam buku panduan disebutkan bahwa perguruan tinggi atau lembaga dapat masuk dalam katagori ramah perempuan jika memiliki pusat studi gender dan anak, unit layanan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penerapan kurikulum responsif dan lain sebagainya. Penerapan kurikulum responsif gender itu perlu waktu, pemikiran dan ahli karena sangat rumit dan banyak kendalanya. Kendala-kendala itu tercermin dalam beberapa hal, diantaranya, jika kurikulum yang akan diberlakukan benar-benar responsif gender harus diawali dari pondasi instansi (kebijakan) yang meliputi, visi, misi dan tujuan, renstra instansi dan kurikulum lalu diturunkan ke visi, misi dan tujuan, kurikulum di tingkat fakultas dan program studi. Itu artinya merombak dari akarnya, sementara banyak perguruan tinggi keagamaan ini sudah dalam separoh bahkan lebih perjalanan, melakukan hal yang demikian ini sangat sulit. Kecuali bagi perguruan tinggi yang baru beralih status, yang mau tak mau memang akan ada penyusunan visi, misi dan tujuan serta renstra sampai ketingkat program studi.

Namun jika pemberlakuan kurikulum responsif gender hanya dicantolkan ke ke mata kuliah pilihan tanpa mempunyai kekuatan hukum seperti yang terjadi UIN di Aceh dan Jakarta, riwayatnya akan cepat hilang dari peredaran, paling dua atau satu semester

saja hal ini diterapkan sebab tidak ada pengontrol keberadaannya. Sedangkan jika diselipkan ke mata kuliah tertentu yang nama mata kuliah sudah ada seperti tafsir, hadis, studi Islam, komunikasi antar budaya dan lainnya, kesulitan menentukan pengajarnya karena tidak semua pengajar dengan keahlian mata kuliah tersebut responsif gender dan mau serta mampu menyautkannya dengan materi tentang gender dan khususnya perempuan.

Adapun alternatif lain yang bisa dilakukan dalam rangka penguatan pemahaman dan aliansi serta jejaring responsif gender menuju kampus ramah perempuan dan itu tidak mengganggu visi, misi tujuan dan rencana namun dapat menguatkan keberadaan instansi menurut Prof. Dr Rohimin, ketua MUI yang responsif gender adalah penggiat gender diikuti sertakan secara aktif dalam even-even gender baik tingkat lokal sampai internasional dan tampil setiap acara akademik baik di kalangan dosen, tenaga pendidikan pada kegiatan klinis gender sedangkan di forum mahasiswa seperti kegiatan orientasi pengenalan kampus bagi mahasiswa baru kampus, stadium general PPL, PKL, KKN, dan lain sebagainya.

Mata kuliah tersebut tersebar di berbagai program studi, sehingga penerapannya ada disesuaikan dengan kebijakan institusinya, dan bisa dibagi ada yang kurikulum institusi, fakultas dan juga program studi. Dan jika visi misi institusi responsif gender maka matakuliah institusi minimal tiga lalu diturunkan ke fakultas juga tiga kemudian program studi tiga matakuliah, namun jika hanya tidak tercermin dalam visi dan misi baik institusi maupun lainnya maka penekanannya cukup pada beberapa mata matakuliah yang ditingkatkan gender sehingga kurikulumnya berbasis gender, sehingga tidak perlu merubah kurikulum yang ada, namun hanya menambahkan dan mengembangkan materi ke gender saja.

C. Efektifitas Penerapan Kurikulum Responsif Gender Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara langsung, pengamatan dan isian google form didapatkan hasil sebagaimana berikut

Dampaknya

1. Belum ada
2. Berimbang
3. Tidak berubah
4. belum ada
5. Saya tidak tahu persis
6. Bagus
7. Baik
8. Ada

9. Ada
10. Sedikit
11. Sedikit
12. Ada..
13. Tidak tahu
14. Saya tidak tahu persis
15. Ada
16. Ya ada
17. Ada
18. sudah ada
19. Ada
20. Ada sedikit
21. Ada
22. Masih belum nampak
23. Ada perubahan sikap yg sangat signifikan, terutama dlm pemberian hak² pd
24. Ada

Dengan demikia, jika di rangkum maka hasilnya sebagaimana berikut ini

1. Belum berdampak

- a. Belum ada
- b. Tidak berubah
- c. belum ada
- d. Tidak tahu
- e. Masih belum nampak

2. Ragu-ragu

- a. Berimbang
- b. Saya tidak tahu persis
- c. Tidak tahu
- d. Saya tidak tahu persis

3. Berdampak

- a. Bagus/lumayan
- b. Baik
- c. Ada
- d. Ada
- e. Sedikit
- f. Sedikit
- g. Ada..
- h. Ada
- i. Ya ada
- j. Ada
- k. sudah ada
- l. Ada
- m. Ada sedikit
- n. Ada
- o. Ada perubahan sikap yg sangat signifikan, terutama dlm pemberian hak²
- p. Ada

Dari data ini dapat dipahami bahwa pembelajaran melalui kurikulum responsive gender walau di tahap ini penerapannya masih melalui berbagai macam metode di setiap kampus dan berbagai kendala yang berbeda pula, namun pelan-pelan dan pasti memberikan pengaruh dan berdampak positif bagi semua orang. Dampak pemberlakuan kurikulum responsive gender dan berbasis (integrasi gender) berdasarkan data di atas terlihat bahwa ada enam belas (16) perguruan tinggi keagamaan negeri yang sudah merasakan dampaknya sedangkan hanya lima (5) yang belum merasakan dampaknya dan ada empat perguruan tinggi yang belum pasti atau ragu-ragu apakah sudah merasakan dampaknya atau belum karena mereka belum melihat adanya keantusiasan, ketertarikan baik mahasiswa maupun teman sejawat ikut, senang membahas ataupun mendengar tentang gender.

Enam belas perguruan tinggi keagamaan negeri yang sudah merasakan dampak positif dari penerapan kurikulum berbasis gender merupakan jumlah yang sangat banyak dan itu menunjukkan bahwa studi gender itu penting dan sangat baik menuju kampus ramah perempuan. Semakin banyak perguruan tinggi merasakan dampak terhadap keberadaan kurikulum responsive gender dan apalagi didukung dengan kebijakan lain baik terkait fasilitas gedung dan ruangan maupun sikap tenaga pengajar, pendidikan dan mahasiswa maka kampus ramah perempuan bukan hal yang naif tapi kenyataan, maka sudah dipastikan Indonesia menjadi Negara yang kuat, sehat serta berkembang yang tinggi.

Sedangkan ada beberapa perguruan tinggi yang belum merasakan dampak positif dari adanya keberadaan, kebijakan penerapan kurikulum berbasis gender, jika kurikulum berbasis gender rutin disampaikan dengan cara apapun maka akan mendapatkan dan merasakan dampaknya. Memang perlu kerja keras, rutin, cerdas dan perlu waktu yang tidak singkat.

Jadi secara umum dapat dideskripsikan bahwa kurikulum perguruan tinggi keagamaan negeri di Indonesia sudah menerapkan kurikulum responsive gender dengan strategi penerapannya melalui cara yang berbeda atau dengan metode penerapan yang berbagai macam cara, ada yang tertera secara jelas dalam kurikulum, ada yang diselipkan saat proses belajar mengajar, diberikan materi gender saat acara pembekalan Kuliah Kerja Nyata, PPL, Magang dan Orientasi pengenalan kampus. Seminar dan artikel, group-group diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Dengan mayoritas perguruan tinggi telah menerapkan kurikulum responsive gender, maka juga dapat ditarik pemahaman secara umum bagaimana dampak diterapkan kurikulum responsive gender.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

Daftar Pustaka

- Ahmad Asrof Fitri dkk, *Menyelami telaga kebahagiaan bersama 20 Ulama perempuan: Interpretasi Berbasis Pengalaman atas Kitab Manba' As-Sa'adah*, (Jawa Barat: Mubadalh.id, 2021)
- ‘Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer)*, Jakarta;Rajawali pers,2010
- ‘Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-imu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005
- Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Shahih; Khusus tentang hak-hak perempuan dalam Islam dilengkapi penafsirannya*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019)
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*, (Bandung: Afkaruna, 2021);
- Fuad Hassan & Koentjaraningrat, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah, dalam Koentjaraningrat (Ed), Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977
- ‘Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta:IRCiSoD, 2020).Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di atas panggung sejarah*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2020)
- Husein Muhammad, *Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2020)
- Hadi, Sofiyah. “Menggagas Pendidikan Karakter Responsif Gender [Initiating Gender-Responsive Character Education].” *PALASTREN* 8, no. 2 (2016).
- Ibrahim, Abdul Syukur. “Pemahaman Sekolah Terhadap Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kurikulum Setara Jender.” *Kajian Linguistik dan Sastra* 1, no. 1 (2016).
- ‘Iskandar,*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta:GP Press,2008
- Puspitarini, Yanuari Dwi, and Yuli Utanto. “Ideologi Gender Dalam Konstruksi Kurikulum Program Studi Di Universitas Negeri Semarang.” *Teknodika* 17, no. 1 (2019).
- Susilaningsih, dkk. *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dengan ‘McGill IISEP, 2004.
- Membangun Kurikulum Berbasis Gender: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, (<http://www.sunanampel.ac.id/berita/detail.php?id=98>)

Kurikulum pendidikan keluarga responsif gender.<http://katalog.kemdikbud.go.id> > ..Pendidikan Keluarga; Classification: 371.78; Series Title: GMD: Text; Language: Indonesia; Publisher: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan .

<https://ejournal.iainkendari.ac.id> > article [pembelajaran Responsif Gender Dalam ..https://docplayer.info](https://docplayer.info) > 208264764-Pembelajaran-respo... dalam Jurnal Madaniyah, Volume 1 Edisi X Januari 2016 ISSN 2086-3462 <https://www.researchgate.net/publication/269584076> Kebijakan Pendidikan Responsif GendeR Article · May 2013 DOI: 10.15548/jk.v3i2.60

Ratna Megawangi, “Sekapur Sirih”, dalam ‘The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam, Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999

Bustamin, “Menggali Isu Gender dalam Kurikulum Hadis dan Ulumul Hadis”, dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, Departemen Agama, UIN Syarif Hidayatullah, CIDA dan McGill, 2005

Roqib, *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta: Gama Media dengan STAIN Purwokerto, 2003
Nashruddin ‘Baidan, *Tafsir bi al-Ra’yi, Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2 Agustus 2008, (<http://www.pps.ui.ac.id/ui/kwkurikulum.htm>)

Syahrul A’dam, “*Isu-isu Gender dalam Mata Kuliah Tasawuf*”, dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender*

Membangun Kurikulum Berbasis Gender: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 02/08/2008, (<http://www.sunanampel.ac.id/berita/detail.php?id=98>).

‘Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pres, 2010

‘Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosada Karya, 2001

‘Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, dan Humaniora)*, cetakan ke-1, Bandung CV. Pustaka Setia, 2002

‘Rahmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, ‘Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004

Patilima, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007

Suprayogo, Imam dan Tabrani, *Metodelogi ‘Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

‘Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. (kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: GP ‘Press, 2008

Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Surabaya; Usaha Nasional, 2008

Kuswarno, Engkus, *'Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi, Konsepsi, Pedoman, dan contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009